

SKRIPSI

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, PROFITABILITAS DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP TAX AVOIDANCE

(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, utility dan transportasi Yang
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2018).



OLEH

HARDILLA RAHMAYANI
155311086

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019

ABSTRAK

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, PROFITABILITAS DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP TAX AVOIDANCE

(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, utility dan transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2018).

Oleh :

Hardilla Rahmayani

Pembimbing I : Yusrawati, SE. M.Si

Pembimbing II : Hj. Siska, SE. M.Si.Ak.CA

Tax Avoidance atau penghindaran pajak adalah sebuah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi yang terdaftar di Bursa periode 2017-2018. Pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* maka berdasarkan kriteria pemilihan sampel perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. sebanyak 27 perusahaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 22 for windows.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : (1) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. (2) *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. (3) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. (4) *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. (5) ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci : ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

ABSTRACT

THE EFFECT OF COMPANY SIZES, LEVERAGE, PROFITABILITY AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON TAX AVOIDANCE (Empirical Study of Infrastructure, Utility and Transportation Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2018).

By:

Hardilla Rahmayani

Supervisor I : Yusrawati, SE. M.Si

Supervisor II : Hj. Siska, SE. M.Si.Ak.CA

Tax Avoidance is a tax avoidance strategy and technique that is carried out legally and safely because it does not conflict with taxation provisions. The method and technique used is to take advantage of the weaknesses (gray area) contained in the laws and tax regulations themselves. This study aims to prove empirically the influence of company size, leverage, profitability and corporate social responsibility on tax avoidance

The population used in this study is the Infrastructure, Utilities and Transportation Sector companies listed on the Exchange in 2017-2018. The sample selection uses purposive sampling then based on the criteria for selecting sample companies in the Infrastructure, Utilities and Transportation sectors listed on the Indonesia Stock Exchange. as many as 27 companies. The type of data used in this study is secondary data, the data collection method uses the documentation method. The data analysis method used is multiple linear regression analysis using the SPSS 22 for windows program.

The results of the study concluded that: (1)company size affects tax avoidance. (2)leverage has no effect on tax avoidance. (3)profitability has no effect on tax avoidance. (4)corporate social responsibility does not affect tax avoidance. (5)company size, leverage, profitability, and corporate social responsibility do not affect tax avoidance

Keywords: company size, leverage, profitability, and corporate social responsibility do not affect tax avoidance.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	10
D. Sistematis Penulisan	11
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	
A. Telaah Pustaka	13
1. Pengertian Pajak	13
2. <i>Tax Planning</i> (Perencanaan Pajak).....	15
3. <i>Tax Avoidance</i> (Penghindarann Pajak).....	17
4. Ukuran Perusahaan	22
5. <i>Leverange</i>	24
6. Profitabilitas.....	27
7. <i>Corporate Social Responsibility</i>	29
8. PenelitianTerdahulu	33

9. Model Penelitian	36
B. Hipotesis	37

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Lokasi / Objek Penelitian	38
B. Definisi Operasional Variabel Penelitian	38
1. Variabel Independen (X)	38
2. Variabel Dependen (Y)	40
C. Populasi Dan Sampel	40
D. Jenis dan sumber data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data	45
1. Analisis statistik deskriptif	46
2. Uji Asumsi Klasik	46
a. Uji Normalitas Data	46
b. Uji Multikolinearitas	47
c. Uji Autokorelasi	48
d. Uji Heterokedasitas	49
3. Koefisien Determinasi (R^2)	50
4. Uji Hipotesis	50
a. Pengujian Secara Parsial (Uji t)	50
b. Pengujian Secara Simultan (Uji F)	51

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia.....	52
B. Profil Perusahaan Sampel.....	52

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	67
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	67
2. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	69
a. Uji Normalitas	69
b. Uji Multikolinear	70
c. Uji Autokorelasi	72
d. Uji Heterokedastisitas	72
3. Teknik Analisis Data	73
4. Uji Hipotesis.....	76
a. Uji Signifikan Simultan (F).....	76
b. Uji Parsial (Uji Statistik T).....	77
c. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	78
B. Pembahasan Hasil Penelitian	79
1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	79
2. Pengaruh Leverage Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	80
3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	80
4. Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	81

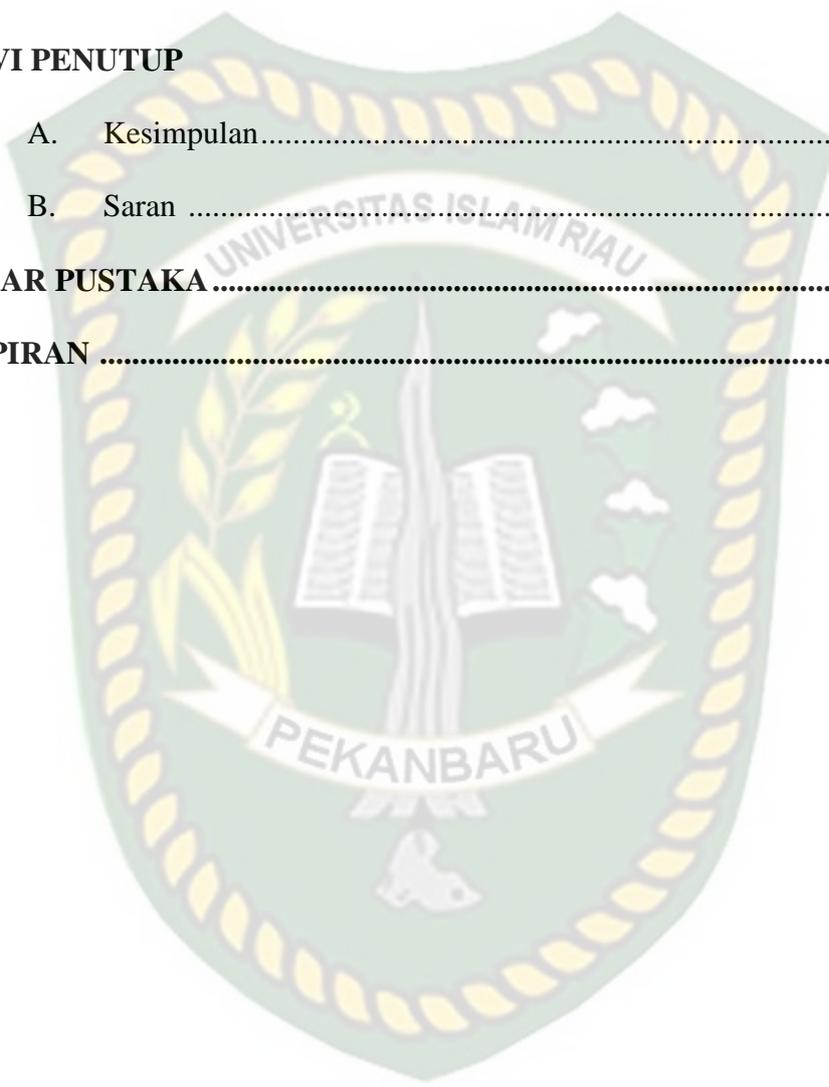
5. Pengaruh Ukuran Perusahaan <i>Leverage</i> , Profitabilitas dan <i>Corporate social responsibility</i> terhadap <i>tax avoidance</i>	82
---	----

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA	86
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	89
-----------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Pengukuran Penghindaran Pajak	20
Tabel III.2 Penelitian Terdahulu	33
Tabel III.1 Daftar Populasi Penelitian	41
Tabel III.2 Daftar Kriteria Sampel	43
Tabel III.3 Daftar Perusahaan Yang Dijadikan Sampel Penelitian	43
Tabel IV.1 Perkembangan Pasar Modal Indonesia	56
Tabel V.1 Descriptive Statistics	68
Tabel V.2 One Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	69
Tabel V.3 Coefficients	71
Tabel V.4 Model Summary	72
Tabel V.5 Anova.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar V.1 Normal P-P Plot Regresi Standardized Residual	70
Gambar V.2 Scatterplot.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara akan dianggap baik perekonomiannya jika mempunyai pendapatan atau anggaran yang dimiliki mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan kegiatan ekonomi dalam keadaan yang stabil serta tingkat inflasi yang rendah. Dengan adanya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dana yang masuk dan keluar dapat direncanakan dan dikendalikan sesuai dengan kebutuhan negara. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, tetapi pendapatan dari sumber daya alam tersebut masih belum mencukupi pengeluaran negara Indonesia. Hal itu menyebabkan pemerintah juga mengandalkan pendapatan yang berasal dari pajak.

Mardiasmo (2016:3) menyatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sumber penerimaan negara yang paling besar yaitu pajak, sehingga setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dengan melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik dan fasilitas umum lainnya. Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan, penerimaan pajak di tahun 2018 mencapai Rp. 1.942,3 triliun atau 102,5 % mengalami kenaikan dari tahun

2017 yang mencapai angka Rp 1.339,8 triliun atau 91 persen dari target yang ditetapkan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP). Angka yang tercatat tersebut terus mengalami kenaikan dari tahun 2016 yang pajaknya berada pada angka 83,5 persen dan tahun 2015 mencapai angka 83,3 persen (www.kemenkeu.go.id). Hal itu dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia sendiri semakin gencar melakukan optimalisasi pajak, terbukti dari tahun ke tahun hasilnya menunjukkan tren yang positif.

Waluyo (2011) mengatakan bahwa menggali sumber dana dari pajak merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan. Pemerintah terus berusaha dalam memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih baik. Dalam mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa masalah atau hambatan di Indonesia. Pemerintah selalu berusaha dalam memperbaiki sistem perpajakan dengan seiring berjalannya waktu yang terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan.

Penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan diharapkan oleh pemerintah yang tentunya bertolak belakang dengan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin oleh mereka. Karena bagi pihak perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan serta anggapan bahwa pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tidak memberikan manfaat ekonomis secara langsung bagi keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung akan mencari cara untuk memperkecil pajak yang mereka bayar baik itu secara legal yang disebut *tax*

avoidance (penghindaran pajak) maupun ilegal yang disebut penggelapan pajak (*tax evasion*).

Salah satu cara yang digunakan perusahaan dalam menghindari pajak secara legal dengan meminimalkan kewajiban pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan yaitu *Tax avoidance* (penghindaran pajak). Penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik untuk dibahas. Karena disatu sisi penghindaran pajak diperbolehkan namun disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Dalam konteks pemerintah indonesia, telah dibuat berbagai aturan untuk mencegah terjadiya penghindaran pajak, meskipun secara hukum penghindaran pajak tidak dilarang karena penghindaran pajak secara langsung mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Dari sudut pandang kebijakan pajak, pembiaran terhadap praktik pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari sistem perpajakan.

Tindakan efisiensi pajak bisa timbul karena peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan, baik dari kelemahan peraturan perundang-undangan maupun kelemahan sumber daya manusia. Di indonesia sistem *self assesment* yang dianut dalam sistem pemungutan pajak, yaitu wajib pajak diberi keleluasaan penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri ketentuan umum perpajakan. Penerapan undang-undang perpajakan ini seakan-akan memberikan kesempatan bagi wajib pajak, yaitu perusahaan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara menekan biaya perusahaan, termasuk didalamnya beban pajak yang dapat menyebabkan selisih yang besar antara jumlah pajak terutang dengan jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak.

Banyak faktor yang memungkinkan dapat mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) diantaranya adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, *log size* dan sebagainya. Semakin besar total asset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Menurut Kurniasih dan Sari (2013), Semakin besar ukuran perusahaannya maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015), Dewinta dan Setiawan (2016), menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin mampu perusahaan tersebut dalam mengatur perpajakan yang dapat memasukan *tax avoidance*. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Semakin besar perusahaan maka semakin besar pula menarik perhatian dari pemerintah terkait dengan laba yang diperolehnya, sehingga mereka sering menarik perhatian para fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Leverage merupakan pembiayaan yang dilakukan menggunakan tingkat hutang dalam perusahaan. Pengukuran *Leverage* dapat diukur dengan cara

membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan dan juga dapat diukur juga dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total ekuitas perusahaan. Pembiayaan hutang terdapat komponen biaya bunga pinjaman yang menjadi pengurang dalam penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, laba perusahaan sebelum kena pajak yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan mayoritas akan cenderung lebih kecil dibandingkan perusahaan yang mendanai kegiatan operasionalnya mayoritas dengan penerbitan saham. Hal tersebut tentunya dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan dan dapat digolongkan sebagai tindakan penghindaran pajak.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mulyani (2016) menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian Dharma (2016) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak akan semakin tinggi dilakukan jika indikasi tingkat utang semakin tinggi. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Darmawan dan Sukartha (2014) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas juga merupakan gambaran dari kinerja keuangan perusahaan dalam memperoleh laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Assets* (ROA). ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Teori agensi akan memacu para agent

untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat.

Hal itu yang menyebabkan Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) menunjukkan bahwa ROA memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Ardyansyah (2014) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Tax avoidance. Hal itu disebabkan laba yang semakin tinggi akan menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai dengan aturan perpajak yang berlaku.

Faktor lainnya yaitu CSR (*Corporate Sosial Responsibility*). Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 mewajibkan bagi perusahaan untuk ikut berperan serta dalam kegiatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan laba perusahaan semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya (Lanis dan Richardson, 2011) menjelaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan, karena CSR merupakan tindak lanjut dari komitmen perusahaan untuk bertindak etis dan berkontribusi untuk pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup baik bagi pekerja dan keluarganya, komunitas lokal, maupun masyarakat dalam lingkungan luas pada umumnya. Apabila ditinjau dari sudut Pajak Penghasilan (PPh), perusahaan biasanya akan memilih strategi untuk

mensiasati pengenaan pajak, sehingga semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR yang dilakukan dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak. Pada dasarnya perusahaan dituntut untuk mampu bertanggung jawab atas seluruh aktivitasnya terhadap para stakeholder. Watson (2011) menyatakan bahwa apabila perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) maka akan dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah disebutkan di atas, dan adanya berbagai hasil terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan, maka peneliti mencoba meneliti kembali faktor yang mempengaruhi tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan *Corporate sosial responsibility* (CSR) sebagai variabel independen dan *tax avoidance* sebagai variabel dependen yang memiliki kesamaan variabel dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviyari (2017). Namun berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), maka dalam kesempatan ini peneliti akan meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi dipilih karena ditemukan Fenomena penghindaran pajak di PT. Indosat yang termasuk

perusahaan telekomunikasi Indonesia yang merupakan bagian dari perusahaan di sektor infrastruktur. Fenomenanya yaitu PT. Indosat Tbk pada tahun 2007 dilaporkan pada KPK oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Marwan Batubara bersama IKA Universitas Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, dan forum Aktivis Kampus ibukota atas dugaan melakukan penggelapan pajak. PT. Indosat diduga telah melakukan penggelapan pajak sejak tahun 2004 dan telah merugikan negara hingga mencapai Rp. 323 Miliar. Laporan keuangannya seolah-olah mengalami penurunan laba akibat manajemen Indosat diduga telah merekayasa transaksi deriatif perusahaan. Sedangkan hasil audit Ernest dan Young yang menunjukkan laporan keuangan Indosat tidak masuk dalam kategori merugi, hal ini menunjukkan hasil yang bertolak belakang. (www.antaraneews.com).

Maka dalam penelitian kali ini peneliti ingin meneliti dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas Dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka perlu dirumuskan masalah yang akan diselesaikan pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Bagaimana pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penulisan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

- c. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- d. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- e. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan penulis tentang masalah yang diteliti, sehingga dapat menjelaskan pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*. Serta untuk menambah pengalaman, dan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam dari teori yang telah diperoleh dengan kenyataan yang terjadi.

b. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan masukan yang dapat membantu penelitian selanjutnya, khususnya topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini serta sebagai salah satu informasi yang berguna bagi siapa saja yang membacanya.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas isi masing-masing BAB dengan sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang yang berisi gambaran penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang melandasi penelitian dengan masalah yang diteliti, serta menunjukkan kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, sampel dan populasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode penelitian, definisi operasional, serta model analisis yang digunakan.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

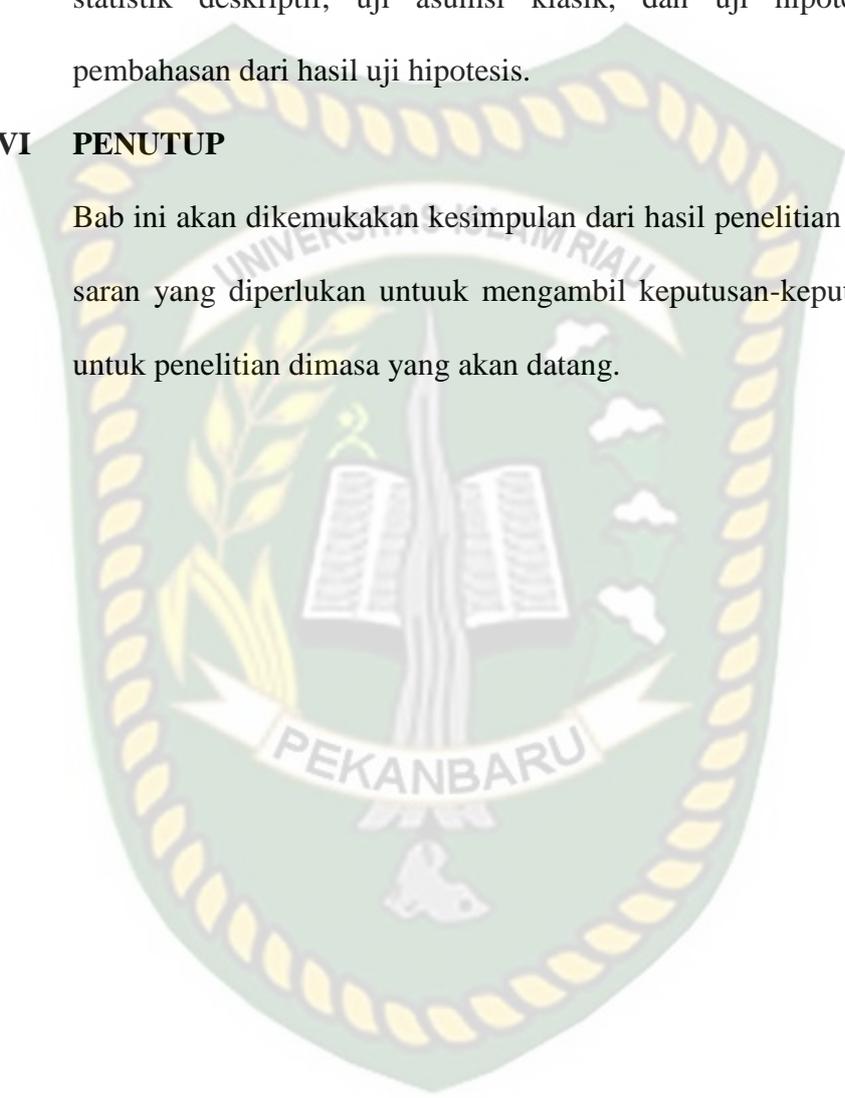
Bab ini akan membahas tentang gambaran secara umum perusahaan yang merupakan sampel dari penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang meliputi hasil statistik baik statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis, serta pembahasan dari hasil uji hipotesis.

BAB VI PENUTUP

Bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan untuk mengambil keputusan-keputusan serta untuk penelitian dimasa yang akan datang.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 (2013:2) adalah :

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Mardiasmo (2016:1) pajak yaitu :

Kas negara yang diperoleh dari iuran rakyat yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan jasa imbalan yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian pajak menurut penulis adalah kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat. ciri-ciri pajak sebagai berikut :

1. Iuran rakyat kepada Negara
2. Berdasarkan Undang-Undang
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung ditujukan
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Resmi (2016: 3) fungsi pajak yaitu:

1. Budgetair (Sumber Keuangan Negara) yang artinya pajak merupakan pembiayaan untuk pengeluaran negara baik dilakukan secara rutin maupun pembangunan yang diperoleh dari pemerintah. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Regularend (Pengatur) yaitu Pajak digunakan sebagai alat untuk mengontrol atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Menurut Resmi (2016:8) tata cara pemungutan pajak terdiri dari stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

a. **Stelsel Pajak**

1. Stelsel Nyata
Pajak dilakukan pada akhir tahun setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Pajak lebih realistis tapi baru dapat dikenakan di akhir periode. Objek (penghasilan yang nyata) dapat dijadikan sebagai dasar Pengenaan Pajak.
2. Stelsel Anggapan (Fictieve stelsel)
Pajak tidak perlu menunggu akhir tahun dan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya. Suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang dapat dijadikan dasar Pengenaan pajak
3. Stelsel Campuran
Merupakan kombinasi dari stelsel Nyata dan stelsel anggapan. Dimana saat awal tahun dihitung menurut anggapan dan saat akhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

b. **Asas Pemungutan Pajak**

1. Asas Domisili
Negara berhak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak diwilayahnya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.
2. Asas Sumber

Penghasilan yang berasal dari sumber wilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal pajak dapat ditentukan oleh negara atas pengenaan pajaknya.

3. Asas Kebangsaan
kebangsaan suatu negara dapat dihubungkan dalam Pengenaan pajak.

c. Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assesment system*
Sistem pemungutan yang memberikan wewenang terhadap pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. ciri-cirinya :
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
 - b. Wajib pajak bersifat pasif
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
2. *Self Assessment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. ciri-cirinya adalah :
 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
 2. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *With Holding System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. ciri-cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga pihak selain fiskus dan wajib pajak

2. Tax Planning

Chairul Anwar Pohan (2014:13) menyatakan bahwa *Tax Planning* merupakan usaha perusahaan dalam melakukan perencanaan agar pajak yang dibayar efisien. Perencanaan pajak ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan manajemen pajak. Dalam tahap ini pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dilakukan untuk menyeleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan. Dalam sudut

pandang perencanaan pajak, *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak adalah sah dan secara yuridis sehingga tidak bisa ditetapkan pengenaan pajak.

Arles P. Ompusunggu (2011:5) mendefinisikan bahwa *tax planing* merupakan kapasitas yang dimiliki wajib pajak dalam meminimalkan pengeluaran pajak dengan cara menyusun aktivitas keuangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah sebuah proses pengorganisasian usaha wajib pajak untuk hutang pajaknya sehingga berada di posisi paling minimal, namun tetap berada di koridor diperbolehkan dalam perturan perundang-undangan. Dalam *tax planning* ada 3 macam cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yaitu :

a. *Tax Saving* (Penghematan Pajak)

Tax Saving atau penghematan pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara legal dan aman untuk menghemat pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

b. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Tax Avoidance atau penghindaran pajak adalah sebuah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.

c. *Tax Evasion* (Penyelundupan Pajak)

Tax Evasion atau penyelundupan pajak adalah kebalikan dari *tax avoidance*, sebuah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara

illegal dan tidak aman bagi wajib pajak. Cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan.

3. Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu cara untuk meminimalkan jumlah pajak yang akan dibayar. Walaupun penghindaran pajak adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Budiman dan Setiyono, 2012)

Iman Santoso dan Ning Rahayu (2013) mengatakan bahwa penghindaran pajak dapat diartikan sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Pohan, Chairil anwar (2016:23), mengatakan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah :

Upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Dari penjelasan mengenai *tax avoidance* diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang dilakukan yaitu

dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Brown (2012:2) berpendapat bahwa kesenjangan antara diterimanya mitigasi (perencanaan pajak) dan tidak dapat diterimanya penghindaran adalah variabel yang tergantung pada prinsip-prinsip dasar Undang-undang pajak suatu negara. Umumnya di semua negara hukum, dalam beberapa situasi, pengadilan telah memberikan wewenang untuk menentukan apakah transaksi bisnis sudah memenuhi persyaratan Undang-undang secara harfiah.

Penghindaran pajak perusahaan menyajikan tantangan serius untuk mengefektifkan administrasi Undang-undang pajak. Penghindaran pajak melibatkan pengaturan transaksi untuk memperoleh keuntungan pajak, manfaat atau pengurangan dalam cara yang tidak diinginkan oleh Undang-undang pajak. Penghindaran pajak merupakan penghinaan terhadap administrasi pajak ketika tidak melanggar prinsip-prinsip inti. Pembayar pajak yang terlibat dalam transaksi penghindaran pajak merusak kemampuan otoritas pajak untuk memprediksi jumlah pendapatan yang besar oleh ketentuan pajak yang diberikan (Brown, 2012:1).

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan ada 3 karakter penghindaran pajak, yaitu adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak, skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu

yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang, dan kerahasiaan juga sebagai alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization*, 1991 dalam Suandy, 2013:7-8).

Kuniasih dan Sari (2013) cara melakukan penghindaran pajak dapat memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*), usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*), dan ketentuan *anti avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Spesific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Surbakti (2012) mengatakan bahwa beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu :

1. Dapat mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan dengan memperlihatkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal.
2. Mengurangi utang pajak perusahaan dengan mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional dan membebankan yang sama terhadap laba bersih.
3. Mengurangi laba bersih dengan membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis.
4. Mengurangi laba kena pajak dengan membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan
5. untuk industri manufaktur dapat melakukan pencatatan untuk pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam sehingga mengurangi laba kena pajak

Apabila melakukan penghindaran pajak, maka akan ada pengorbanan waktu dan tenaga yang harus ditanggung serta adanya resiko yang akan diterima jika penghindaran pajak ini terungkap. Dimulai dari bunga dan denda serta kehilangan reputasi perusahaan yang dapat berakibat buruk untuk kelangsungan usaha jangka panjang perusahaan. Dalam hal ini pemerintah Indonesia, telah membuat berbagai aturan demi mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satunya dengan *transfer pricing*, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-32/PJ/2011 (Budiman dan Setiyono, 2012). Pada saat ini banyak cara dalam pengukuran tax avoidance. Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) ada dua belas dalam pengukuran tax avoidance yaitu :

TABEL II.1
Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

No	Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	<i>Total tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
2	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre - tax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
3	Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxed expense}}{\text{Worldwide total pre - tax accounting income}}$	<i>Cash taxed paid per dollar of pre-tax book income</i>

4	<i>long –run cash ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide cash taxed expense}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>sum of cash taxed paid over n years divided by the sun of pre-tax earning over n years</i>
5	ETR Differential	Statutory ETR-GAAP ETR	<i>The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR</i>
6	DTAX	<i>Error term from the following regression ETR differential x pre –tax book income = a + b x Control + e</i>	<i>the unexplained portion of the ETR differential</i>
7	<i>Total</i> BTD	<i>Pre-tax book income – ((U.S. CTE+Fgn CTE)/ U.S.STR) – (NOLt – NOLT-1))</i>	<i>the total difference between book and taxable income</i>
8	<i>Temporary</i> BTD	<i>Deferred tax expense / U.S.STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
9	<i>Abnormal total</i> BTD	<i>Residual from BTD/Tait = TAit+ mi+ eit</i>	<i>Tax liability accrued for taxed not yet paid on uncertain positions</i>
10	<i>Unrecogniz ed tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Firms identified via firms disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
11	<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variabel for firms accused of engaging</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS</i>

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

			<i>confidential data</i>
12	<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxed on an additional dollar of income</i>

Sumber : *journal of accounting and economics* 50,127-128

Menurut Dyreng, *et al*(2010) Pengukuran penghindaran pajak dapat dilakukan melalui CETR (*Cash Effective Tax Rate*). Dimana kas yang dikeluarkan perusahaan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Menurut Dyreng, *et al* (2010) rumus untuk menghitung CETR yaitu :

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Dyreng, *et. al* (2010) mengatakan bahwa pengukuran *tax avoidance* menggunakan Cash ETR baik karena penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat tergambarkan, sebab cash ETR tidak terpengaruh dengan perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Penggunaan Cash ETR juga dapat menjawab permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model GAAP ETR. Apabila nilai Cash ETR semakin kecil maka semakin besar penghindaran pajaknya dan itu juga berlaku sebaliknya.

4. Ukuran Perusahaan

Menurut Brigham dan Huston yang di alih bahasakan oleh Ali Akbar Yulianto (2011:418) Pengertian Ukuran Perusahaan merupakan rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Jumlah pendapatan sebelum pajak akan diperoleh apabila penjualan lebih besar daripada

biaya variabel dan biaya tetap. Sebaliknya, Perusahaan akan mengalami kerugian apabila penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap.

Torang (2012:93) menyatakan bahwa pengetahuan ukuran perusahaan merupakan suatu variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi. Menurut Hartono (2015:254) ukuran perusahaan merupakan penggunaan perhitungan nilai logaritma total aktiva dalam mengukur besar kecilnya suatu perusahaan. Agnes Sawir (2012:17) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan penentuan tingkat kemudahan perusahaan dalam memperoleh dana dari pasar modal.

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan adalah skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari equity, nilai perusahaan, jumlah karyawan dan nilai total aktiva yang merupakan variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi. Metode dalam pengukuran ukuran perusahaan menurut Rosyeni rasyid (2014) menggunakan dua rumus yaitu:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln Total Assets}$$

Jika aset yang dimiliki semakin besar oleh suatu perusahaan maka perusahaan dapat memenuhi permintaan produk dan juga dapat melakukan investasi, baik untuk aset lancar maupun aset tetap. Jika hal ini terjadi maka akan memperluas pangsa pasar yang akan dicapai, dan juga akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln Total Penjualan}$$

Setiap perusahaan pasti berharap mempunyai penjualan yang terus meningkat karena perusahaan dapat menutup biaya yang keluar pada saat proses produksi. Hal ini akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan karena laba perusahaan yang akan ikut meningkat. Menurut Rosyeni rasyid (2014) proksi ukuran perusahaan baik digunakan adalah total aset, karena nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai market capitalized dan penjualan.

5. *Leverange*

Menurut Wastam Wahyu.H (2017) *Leverage* merupakan rasio yang mengukur aktiva perusahaan yang dibiayai utang. Atau rasio ini sebagai pengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, baik yang jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan dalam prakteknya dalam memenuhi kebutuhan dana dan menutupi kekurangan, perusahaan memiliki beberapa pilihan yang dapat digunakan. Salah satunya menggunakan modal pinjaman (utang). Dengan modal pinjaman maka akan menambah motivasi manajemen untuk bekerja lebih aktif dan kreatif karena memiliki beban dalam membayar kewajibannya. Selain itu modal pinjaman juga relatif jumlahnya tidak terbatas.

Darmawan dan Sukartha (2014) menyatakan bahwa *leverange* merupakan penambahan jumlah utang yang akan mengurangi pajak yang akan dibayar oleh perusahaan dikarenakan penambahan jumlah utang mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan.

Menurut Darmawan dan Sukartha (2014), pembiayaan yang berasal dari utang jarang digunakan perusahaan besar karena mereka cenderung

memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Hal ini akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh demi mendapatkan sorotan pemerintah.

Jadi berdasarkan penjelasan diatas, menunjukkan bahwa *leverage* digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Jika rasio leverage digunakan dengan baik maka akan memberikan manfaat yang banyak bagi perusahaan dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi, namun hal ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan dan semua kebijakan yang berlaku. Menurut Kasmir (2013) ada beberapa tujuan perusahaan dalam penggunaan rasio *leverage* yaitu :

1. Untuk dapat mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditur).
2. Untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva
4. Untuk menilai seberapa besar pembiayaan aktiva perusahaan dengan menggunakan utang.
5. Untuk mengukur pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur jaminan utang jangka panjang yang dijadikan jaminan dari setiap rupiah modal sendiri
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih.

Metode pengukuran leverage Menurut Kasmir (2013:155) secara umum terdapat 5 (lima) jenis rasio leverage yaitu :

1. *Debt to Total Asset Ratio (DAR)* yang juga disebut sebagai debt ratio. Debt ratio merupakan rasio yang membandingkan total utang perusahaan dengan total aktiva.

$$\text{Debt Ratio (DAR)} = \frac{\text{total liabilitas}}{\text{Total assets}}$$

2. *Debt to Equity Ratio (DER)* merupakan rasio untuk menilai utang dengan ekuitas. Untuk memperlihatkan jumlah jaminan yang tersedia untuk kreditur biasanya menggunakan DER untuk menganalisisnya.

Rumus dari *Debt to equity* yaitu :

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

3. *Time Interest Earned Ratio* (rasio kelipatan) yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga, atau mengukur seberapa besar laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*), karena tidak mampu membayar bunga. Rumus dari *Time interest earned ratio* ini yaitu :

$$\text{Time Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

4. *Fixed Charge Coverage Ratio* (rasio menutup beban tetap). Rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). *Rasio Fixed charge coverage* ini mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya. Rumus untuk mengukur *Fixed Charge Coverage Ratio* yaitu :

$$\text{FCC} = \frac{\text{EBIT} + \text{Beban bunga} + \text{kewajiban sewa}}{\text{Beban bunga} + \text{kewajiban sewa}}$$

5. *Long-term Debt to Equity Ratio (LTDtER)* merupakan rasio utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur Jaminan utang jangka panjang dari setiap bagian rupiah modal sendiri. Cara nya dengan membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. *Long term debt* merupakan sumber dana pinjaman yang bersumber dari utang jangka panjang. Rumus untuk mengukur LTDtER yaitu :

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Long term Debt}}{\text{Equity}}$$

Debt to Equity Ratio(DER) baik digunakan karena rasio ini berfungsi untuk mengukur utang dengan ekuitas. caranya dengan melakukan perbandingan antara seluruh utang dengan seluruh jumlah ekuitas. Rasio ini juga berfungsi untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Jadi dengan kata lain rasio ini juga bertujuan untuk

mengetahui setiap jumlah rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.

6. Profitabilitas

Fahmi (2014) menyatakan profitabilitas merupakan Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Yaitu berhubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas menurut Kasmir (2014) merupakan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi perusahaan menggunakan utang yang relatif kecil dan menggunakan pendanaan internal. Dengan kata lain, perusahaan dengan laba ditahan yang besar, akan menggunakan laba ditahan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menggunakan utang.

Profitabilitas merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja manajemen, tingkat profitabilitas akan menggambarkan posisi laba perusahaan. Para investor di pasar modal sangat memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan meningkatkan laba, hal ini merupakan daya tarik bagi investor dalam melakukan jual beli saham, oleh karena itu manajemen harus mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.

Rasio profitabilitas bermanfaat bukan hanya untuk pemilik usaha dan manajemen saja melainkan dari pihak luar perusahaan juga, terutama bagi pihak yang mempunyai hubungan atau kepentingan terhadap perusahaan. Tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan yakni :

1. Untuk menghitung laba yang didapatkan perusahaan dalam satu periode tertentu
2. Untuk mengukur posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang

3. Untuk mengukur perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Untuk mengukur besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk menilai produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan.

Rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada dilaporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan posisi keuangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus sebagai evaluasi terhadap kinerja manajemen sehingga dapat diketahui penyebab dari perubahan kondisi keuangan perusahaan tersebut. Semakin lengkap jenis rasio yang digunakan, semakin sempurna hasil yang akan dicapai, sehingga posisi dan kondisi tingkat profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna. Fahmi (2013:135), dan Sartono (2012:122) secara umum menyatakan terdapat empat jenis utama yang digunakan dalam menilai tingkat profitabilitas, yaitu:

1. *Gross Profit Margin Rasio* merupakan pengukur dari presentase laba kotor dibandingkan dengan penjualan. Apabila gross profit margin semakin baik, maka semakin baik operasional perusahaan. Tetapi perlu diperhatikan harga pokok penjualan karena dapat mempengaruhi gross profit margin. gross profit margin akan menurun Apabila harga pokok penjualan meningkat, begitu pula sebaliknya. rumus untuk mengukur Gross profit yaitu :

$$\text{Gross Profit Margin Rasio} = \frac{\text{Net Sales} - \text{Cost Of Good Sold}}{\text{Sales}}$$

2. *Net Profit Margin Rasio* merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini yaitu penjualan yang sudah dikurangi dengan seluruh beban termasuk pajak

dibandingkan dengan penjualan. Margin laba yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan hasil yang baik yang melebihi harga pokok penjualan. Rumus mengukur *Net profit margin* yaitu :

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Sales}}$$

3. *Return On Equity (ROE)* merupakan Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. rasio ini mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. rumus ROE dapat dihitung dengan sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Shareholder's equity}}$$

4. *Return On Assets (ROA)* yaitu Rasio yang mengukur perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan perusahaan. Rasio ini digunakan untuk suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Peghitungan ROA menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Total Assets}}$$

Return On Asset (ROA) baik digunakan sebagai alat ukur profitabilitas, karena ROA paling berkaitan dengan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Apabila perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak maka Semakin tinggi rasio ini, dengan kata lain kinerja perusahaan semakin efektif.

7. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan. Pelaksanaan kewajiban ini harus memerhatikan dan menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha tersebut. CSR merupakan suatu konsep bahwa perusahaan

memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak hanya berdasarkan faktor keuangan belaka seperti halnya keuntungan atau dividen, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial lingkungan untuk saat ini maupun jangka panjang (Budi Untung, 2014:2).

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) pada dasarnya adalah sebuah kebutuhan bagi korporat untuk dapat berinteraksi dengan komunitas lokal sebagai bentuk masyarakat secara keseluruhan. Kebutuhan korporat untuk beradaptasi dan guna mendapatkan keuntungan sosial dari hubungannya dengan komunitas lokal, sebuah keuntungan sosial berupa kepercayaan (*trust*). CSR tentunya sangat berkaitan dengan kebudayaan perusahaan dan etika bisnis yang harus dimiliki oleh budaya perusahaan, karena untuk melaksanakan CSR diperlukan suatu budaya yang didasari oleh etika yang bersifat adaptif (Bambang Rudito & Melia Famiola, 2013:1).

Pandangan konsep manajemen modern, menyebutkan bahwa perusahaan tidak dapat dipisahkan dari para individu yang terlibat di dalamnya dan *stakeholders* di luar perusahaan. Oleh karena itu selain bertanggung jawab secara internal bagi kelangsungan usahanya, pemilik perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial kepada publik. Menurut pandangan ini, masyarakat adalah sumber dari segala sumberdaya yang dimiliki dan direproduksinya. Para profesional

bekerja untuknya pun memiliki tanggung jawab ganda, selain kepada pemilik juga kepada publik.

Kesan dan komitmen perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya merupakan keputusan yang secara sepintas tidak sejalan atau bahkan bertolak belakang dengan tanggung jawab lainnya, terutama tanggung jawab untuk menghasilkan laba sebesar-besarnya. Memberi sumbangan, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial, bukan saja terkesan sebagai pekerjaan yang tidak perlu, melainkan juga bisa mengacaukan misi utama perusahaan yakni, mencari keuntungan.

Kebanyakan masih menganggap kegiatan CSR sebagai semacam kebijakan kemurahan hati yang diberikan bisnis bagi masyarakat, dan sumbangan semacam ini hanya tepat dilakukan setelah perusahaan mapan, tumbuh, dan mendapat keuntungan. CSR jenis ini sangat khas dan manfaat yang dihasilkan hanya dirasakan sekali oleh masyarakat dan berdampak sangat terbatas bagi perusahaan. Nyata bahwa manfaat bagi kedua pihak: masyarakat dan perusahaan tidak berkelanjutan (Sri Urip, 2014:3).

Di sisi lain, didorong oleh revolusi teknologi komunikasi dan didukung oleh perubahan politik, ekonomi, dan sosial; tak terhindarkan bahwa semua bisnis di suatu negara menjadi bagian dari pasar global yang lebih luas. Dalam 15 tahun terakhir, dunia juga melihat perubahan yang sangat besar: jatuhnya komunisme, liberalisasi di China, Vietnam, dan India, munculnya kegiatan sektor lembaga non-pemerintah (LSM), paham kesadaran lingkungan (*environmentalism*), fundamentalisme, konsumerisme, proteksi, World Social Forum, dan lain

sebagainya. Berbagai perubahan ini berpengaruh besar bukan hanya pada sikap pemerintah dan bisnis, tetapi juga masyarakat (Sri Urip, 2014:4).

Kemajuan teknologi informasi juga menyebabkan ketersediaan jaringan televisi global internet yang memudahkan penyebaran informasi secara seketika. Kritikus bisnis mendapat informasi lebih baik dengan pertolongan komunikasi global dan internet, sementara pelanggan dan konsumen menjadi lebih menyadari hak serta kekuatannya untuk mempengaruhi tingkah laku perusahaan (Sri Urip, 2014:4).

Perusahaan diharuskan memerhatikan kepentingan *stakeholders* perusahaan, menciptakan nilai tambah (*value added*) dari produk dan jasa bagi *stakeholders* perusahaan dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya. Karena itu, prinsip *responsibility* lebih mencerminkan *stakeholders driven concept*. Dengan konsep ini, perusahaan harus lebih memerhatikan dimensi sosial dan lingkungan demi kelangsungan perusahaan karena kondisi keuangan saja tidak cukup untuk menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan memerhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup (Budi Untung, 2014:11).

Saat ini standar GRI versi terbaru, yaitu G4 telah banyak digunakan oleh perusahaan di Indonesia. GRI-G4 menyediakan kerangka kerja yang relevan secara global untuk mendukung pendekatan yang terstandarisasi dalam pelaporan yang mendorong tingkat transparansi dan konsistensi yang diperlukan untuk membuat informasi yang disampaikan menjadi berguna dan dapat dipercaya oleh pasar dan masyarakat. Fitur yang ada di GRI-G4 menjadikan

pedoman ini lebih mudah digunakan baik bagi pelapor yang berpengalaman dan bagi mereka yang baru dalam pelaporan keberlanjutan sektor apapun dan didukung oleh bahan-bahan dan layanan GRI lainnya. (www.globalreporting.org).

8. Penelitian Terdahulu

TABEL II.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas Dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	Independent (X) : Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas Dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Dependent (Y) : Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Dan <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh secara negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
2.	Swingly. Calvin dan I Made Sukartha. 2015	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan <i>Sales Growth</i> pada <i>Tax Avoidance</i> .	Independent (X) : Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan <i>Sales Growth</i> Dependent (Y) : <i>Tax Avoidance</i>	karakter eksekutif berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> , komite audit tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> , ukuran perusahaan berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> , <i>leverage</i> berpengaruh negatif pada <i>tax avoidance</i> , dan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> .

3.	Siregar Rifka dan Widyawati dini. 2016	Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak	<p>Independent (X) : karakteristik perusahaan</p> <p>Dependent (Y) : penghindaran pajak</p>	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak, <i>Size</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak, <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, <i>Inventory Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4.	Prakosa, Kesit Bambang. 2014	Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia	<p>Independent (X) : Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan <i>Corporate Governance</i></p> <p>Dependent (Y) : Penghindaran Pajak Di Indonesia</p>	profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Komisaris independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
5.	Darmawan, I Gede Hendy dan I Made Sukartha. 2014	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance</i> , <i>Leverage</i> , <i>Return On Assets</i> dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak.	<p>Independent (X) : Penerapan <i>Corporate Governance</i>, <i>Leverage</i>, <i>Return On Assets</i> dan Ukuran Perusahaan</p> <p>Dependent (Y) : Penghindaran Pajak.</p>	Corporate governance berpengaruh pada penghindaran pajak. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. ROA berpengaruh pada penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak.

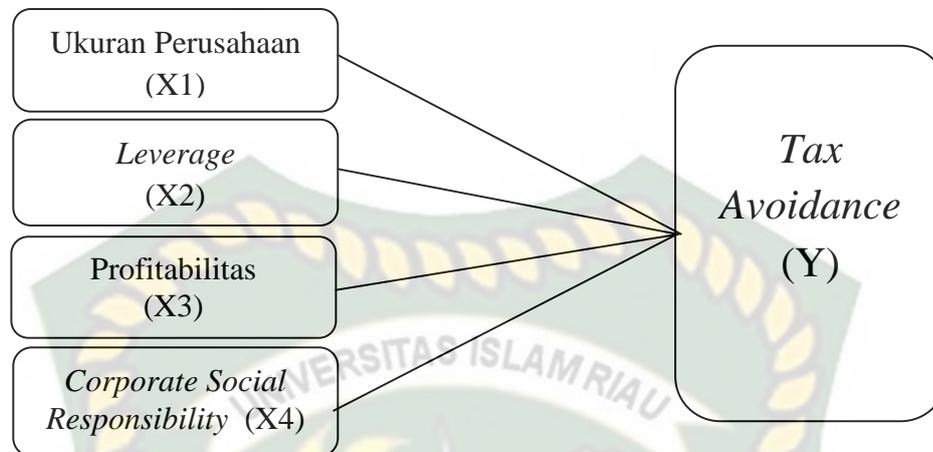
6.	Kurniasih, T., & Sari M. 2013	Pengaruh <i>Return on Assets (ROA)</i> , <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada <i>Tax Avoidance</i> .	Independent (X) : Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Dependent (Y) : <i>Tax Avoidance</i>	<i>Return on Assets (ROA)</i> , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>Leverage</i> dan <i>Corporate Governance</i> tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i>
7.	Fatharani, Nazhaira. 2012	Pengaruh Karakteristik Kepemilikan, Reformasi Perpajakan, dan Hubungan Politik Terhadap Tindakan Pajak Agresif	Independent (X) : Karakteristik Kepemilikan, Reformasi Perpajakan, dan Hubungan Politik Dependent (Y) : Tindakan Pajak Agresif	Karakteristik Kepemilikan Tidak Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Tindakan Pajak Agresif, Reformasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Tindakan Pajak Agresif, Hubungan Politik Tidak Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Tindakan Pajak Agresif
8.	Dewinta dan Setiawan (2016)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Provitabilita, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Independent (X) : Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Provitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan Dependent (Y) : <i>Tax Avoidance</i>	Ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

9.	Mulyani (2016)	Pengaruh <i>Leverage</i> , profitabilitas, intensitas aset tetap, intensitas persediaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Independent (X) : <i>Leverage</i> , profitabilitas, intensitas aset tetap, intensitas persediaan Dependent (Y) : <i>Tax Avoidance</i>	<i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap <i>Tax avoidance</i> . Intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
10.	Dharma dan Ardiana (2016)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Independent (X) : <i>Leverage</i> , Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Dependent (Y) : <i>Tax Avoidance</i>	<i>Leverage</i> dan insentitas aset tetap berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan koneksi politik tidak berpengaruh.
11	Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut Jati. 2014.	Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada <i>Tax Avoidance</i> Di Bursa Efek Indonesia	Independent (X) : Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Dependent (Y) : <i>Tax Avoidance</i>	risiko perusahaan, kualitas audit, dan komite audi berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . ukuran perusahaan, <i>multinational company</i> , kepemilikan institusional, dan proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tindakan <i>tax avoidance</i>

9. Model Penelitian

Model kerangka pemikiran teoritis menggambarkan hubungan antara variabel yang diuji dalam penelitian. Kerangka pemikiran ini juga menggambarkan hubungan variabel Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas

dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *tax avoidance*.



B. Hipotesis

- H1: Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- H2: *Leverange* Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- H3: Profitabilitas Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- H4: *Corporate Social Responsibility* Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- H5: Ukuran Perusahaan, *Leverange*, Profitabilitas Dan *Corporate Social Responsibility* Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Penelitian mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverange*, Profitabilitas Dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *tax avoidance* ini dilakukan pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017- 2018.

B. Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu Ukuran Perusahaan (X_1), *Leverage* (X_2), Profitabilitas (X_3), *Corporate Social Responsibility* (X_4) dan variabel terikat adalah *tax avoidance* (Y).

1. Variabel bebas (independent variabel)

Dalam penelitian ini terdapat 4 (empat) variabel independen yang diteliti yaitu Ukuran Perusahaan (X_1), *Leverage* (X_2), Profitabilitas (X_3), *Corporate Social Responsibility* (X_4) Variabel independen dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Ukuran Perusahaan (X_1)

Hartono (2015:254) mengatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan perhitungan nilai logaritma total aktiva yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya perusahaan. Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah indikator Total Aset menurut Hartono (2015:282), yaitu:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln Total Assets}$$

b. *Leverage* (X_2)

Leverage dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel kontrol yang

bertujuan untuk mengendalikan variabel-variabel di luar penelitian yang dapat mempengaruhi variabel bebas dengan variabel terikat yang digunakan dalam penelitian. Dalam kenyataannya, *leverage* dapat diukur menggunakan rasio-rasio seperti, *debt to asset ratio* (DAR), *debt to equity ratio* (DER), dan lain sebagainya, namun dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan yaitu *debt to equity ratio* (DER)

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Equity}}$$

c. Profitabilitas (X_3)

Agus Sartono (2012:122) menyatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan Kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah indikator *Return On Assets* menurut Agus Sartono (2012:123), yaitu:

$$Return\ On\ Assets = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

d. *Corporate Social Responsibility* (X_4)

Menurut Deegan (2002) dalam Lanis dan Richardson (2013) menyatakan bahwa pengungkapan CSR dipandang sebagai sarana yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas untuk mempengaruhi persepsi. Pengungkapan CSR terdapat dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan, laporan sumber daya manusia, laporan kesehatan dan keselamatan kerja.

Adapun rumus untuk menghitung CSR adalah :

$$CSRI_j = \frac{X_{yi}}{n_i}$$

Keterangan :

CSRI_i : Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan i.

x_{yi} : nilai 1 = jika item y diungkapkan; 0 = jika item y tidak diungkapkan.

N : jumlah item untuk perusahaan i, n_i = 91.

2. Variabel Dependen

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen (Y) adalah *tax avoidance*. Budiman dan Setiyono (2012) menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang atau aturan lain yang berlaku dengan kata lain memanfaatkan peluang-peluang yang ada.

Pengukuran *tax avoidance* menggunakan *CETR* yaitu dengan membagi kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

C. Populasi dan Sampel

Menurut Sanusi (2011:87) populasi merupakan sekumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

pada tahun 2017- 2018 yang berjumlah 60 perusahaan yang terbagi dalam 5 sub sektor perusahaan.

TABEL III.1
Daftar Populasi Penelitian

No	Kode	Nama Perusahaan	Tanggal Listing
1	KOPI	PT. Mitra Energi Persada Tbk.	4 Mei 2015
2	LAPD	PT Leyand Internasional Tbk.	17 Juli 2001
3	MPOW	PT Megapower Makmur Tbk	5 Juli 2017
4	PGAS	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	15 Desember 2003
5	POWR	PT Cikarang Listrindo Tbk	14 Juni 2016
6	RAJA	PT Rukun Raharja Tbk	19 April 2006
7	TGRA	PT Terregra Asia Energy Tbk	16 Mei 20017
8	CMNP	PT Citra Marganusaphala Persada Tbk.	10 Januari 1995
9	JSMR	PT Jasa Marga Tbk.	12 November 2007
10	META	PT Nusantara Infrasructur Tbk.	18 Juli 2001
11	BTEL	PT Bakrie Telecom Tbk.	3 Februari 2006
12	EXCL	PT Xl. Axiata Tbk.	29 September 2005
13	FREN	PT Smartfren Telecom Tbk.	29 November 2006
14	ISAT	PT Indosat Tbk.	19 Oktober 1994
15	TLKM	PT Telekomunikasi Tbk.	19 November 1995
16	APOL	PT Arpeni Pratama Tbk.	22 Juni 2005
17	ASSA	PT Adi Sarana Armada Tbk.	12 November 2012
18	BBRM	PT Pelayaran Nasional Bima Buana Raya Tbk.	9 Januari 2013
19	BIRD	PT Blue Bird Tbk	5 November 2014
20	BLTA	PT Berlian Laju Tanker Tbk.	26 Maret 1990
21	BULL	Buana Lintas Lautan Tbk	23 Mei 2011
22	CANI	PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk.	16 Januari 2014
23	CASS	PT Cardig Aero Service Tbk	5 Desember 2011
24	GIAA	PT Garuda Indonesia Tbk.	11 Februari 2011
25	HITS	PT Humpus Intermoda Transportasi Tbk.	15 Desember 1997
26	IATA	PT Indonesia Air Transportation & Infrastructur Tbk.	13 September 2006
27	INDX	PT Tanah Laut Tbk	17 Mei 2001
28	IDCM	PT Jasa Armada Indonesia Tbk.	22 Desember 2017
29	KARW	PT Ictsi Jasa Prima Tbk	17 Mei 2001
30	LEAD	PT Logindo Samuderamakmur Tbk	11 Desember 2013
31	LRNA	PT Ekasari Lorena Transpor Tbk.	15 April 2014
32	MBSS	PT Mitra Bantera Segara Sejati Tbk.	6 April 2011
33	MIRA	PT Mitra International Resource Tbk.	30 Januari 1997

34	NELY	PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk.	11 Oktober 2012
35	PORT	PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.	16 Maret 2017
36	PTIS	PT Indo Straits Tbk.	12 Juli 2011
37	RIGS	PT Rig Tenders Indonesia Tbk.	26 Maret 1990
38	SAFE	PT Steady Safe Tbk	15 Agustus 1994
39	SDMU	PT Sidomulyo Selaras Tbk.	12 Juli 2011
40	SHIP	PT Silio Maritime Perdana Tbk.	16 Juni 2016
41	SMDR	PT Samudera Indonesia Tbk.	5 Desember 1999
42	SOCI	PT Soechi Lines Tbk	3 Desember 2014
43	TAMU	PT Pelayaran Tamarin Samudera Tbk.	10 Mei 2017
44	TAXI	PT Expres Transindo Utama Tbk.	2 November 2012
45	TMAS	PT Pelayaran Tempura Emas Tbk.	9 Juli 2003
46	TPMA	PT Trans Power Marine Tbk	20 Februari 2013
47	TRAM	PT. Trada Alam Minera Tbk	10 September 2008
48	WEHA	PT Weha Transportasi Indo Tbk.	3 Mei 2007
49	WINS	PT Winterma Offshore Marine Tbk.	29 November 2010
50	ZBRA	PT Zebra Nusantara Tbk.	1 Agustus 1991
51	BALI	PT Bali Towerindro Sentra Tbk.	13 Maret 2014
52	BUKK	PT Bukaka Teknik Utama Tbk.	29 Juni 2015
53	IBST	PT Inti Bangunan Sejahtera Tbk.	31 Agustus 2012
54	INDY	PT Indika Energy Tbk.	11 Juni 2008
55	OASA	PT Protech Mitra Perkasa Tbk.	18 Juli 2016
56	PPRE	PT Pp Persisi Tbk.	24 November 2017
57	SUPR	PT Solusi Tunas Pratama Tbk.	11 Oktober 2011
58	TBIG	PT Tower Bersama Infrastuktur Tbk.	26 Oktober 2010
59	TOWR	PT Sarana Menara Nusantara Tbk.	8 Maret 2010
60	TRUB	PT Truba Alam Manunggal Tbk.	16 Oktober 2006

Sumber : www.sahamoke.com

Sample merupakan bagian dari populasi, banyak cara untuk memperoleh sample salah satunya ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Ulum dan Juanda (2016:84) menyatakan bahwa *purposive sampling* merupakan salah satu metode yang berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu dalam penentuan sampelnya. *purposive sampling* dipilih karena dalam penelitian ini hanya perusahaan yang memenuhi kriteria saja yang dapat dijadikan objek penelitian.

TABEL III.2
Daftar Kriteria Sample

No	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	60
2.	Perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tidak memiliki laporan keuangan lengkap selama periode 2017 dan 2018	(8)
3.	Perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki laporan keuangan lengkap selama periode 2017 dan 2018	52
4.	Perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mengalami rugi selama periode 2017 dan 2018.	(25)
5	Perusahaan yang dapat dijadikan sample penelitian	27

Sumber : data diolah

Berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan terdapat 27 Perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi kriteria yaitu :

TABEL III.3
Daftar Perusahaan Yang Dijadikan Sample Penelitian

No	Kode	Nama Perusahaan	Tanggal Listing
1	PGAS	PT. Perusahaan Gas Negara Tbk	15 Desember 2003
2	POWR	PT. Cikarang Listrindo Tbk	14 Juni 2016
3	RAJA	PT. Rukun Raharja Tbk	19 April 2006
4	CMNP	PT. Citra Nusaphala Persada Tbk	10 Januari 1995
5	JSMR	PT. Jasa Armada Indonesia Tbk	12 November 2007
6	META	PT. Nusantara Infrastructure Tbk	18 Juli 2001
7	TLKM	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk	19 November 1995
8	ASSA	PT. Adi Sarana Armada Tbk	12 November 2012
9	BIRD	PT. Blue Bird Tbk	5 November 2014
10	BULL	PT. Buana Lintas Lautan Tbk	23 Mei 2011
11	CASS	PT. Cardig Aero Services Tbk	5 Desember 2011
12	HITS	PT. Humpus Intermoda Transportasi Tbk	15 Desember 1997
13	KARW	PT. ICTSI Jasa Prima Tbk	17 Mei 2001
14	NELY	PT. Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk	11 Oktober 2012
15	SHIP	PT. Sillo Maritime Perdana Tbk \	16 Juni 2016
16	SMDR	PT. Samudera Indonesia Tbk	5 Desember 1999

17	SOCI	PT. Soechi Lines Tbk	03 Desember 2014
18	TMAS	PT. Pelayaran Tempura Emas Tbk	9 Juli 2003
19	TPMA	PT. Trans Power Marine Tbk	20 Februari 2013
20	TRAM	PT. Trada Alam Minera Tbk	10 September 2008
21	WEHA	PT. Weha Transportasi Indonesia	3 Mei 2014
22	BALI	PT. Bali Towerindo Sentra Tbk	13 Maret 2014
23	BUKK	PT. Bukaka Teknik Utama Tbk	29 Juni 2015
24	IBST	PT. Inti Bangun Sejahtera Tbk	31 Agustus 2012
25	INDY	PT. Indika Energy Tbk	11 Juni 2008
26	TBIG	PT. Tower Bersama Infrastructure Tbk	26 Oktober 2010
27	TOWR	PT. Sarana Menara Nusantara Tbk	8 Maret 2010

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data diatas maka diperoleh 27 perusahaan yang dapat dijadikan data pertahun, sehingga diperoleh jumlah data (n) sebanyak 27×2 periode = 54

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2018. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa catatan atas laporan keuangan perusahaan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan perusahaan Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2018 dalam situs resmi BEI www.idx.co.id.

E. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka yaitu pengumpulan data dan informasi dengan mengolah literatur, buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu maupun media tertulis lainnya

yang berhubungan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, menggunakan metode studi dokumentasi yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda (multiple linear regression), persamaan regresi linear berganda disusun untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer *statistical package for social science* (SPSS).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots \dots$$

keterangan :

- Y : *Tax Avoidance*
 α : Konstanta
 $\beta_1 - \beta_4$: Koefisien regresi variabel independen
 X_1 : Ukuran Perusahaan
 X_2 : *Leverage*
 X_3 : Profitabilitas
 X_4 : *Corporate Social Responsibility*
e : Standar Error

Analisis regresi linear berganda ini dilakukan apabila telah dilakukannya uji asumsi klasik. Dimana Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan

Corporate Sosial Responsibility dalam penelitian ini merupakan variabel independen dan *Tax Avoidance* merupakan variabel dependen.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Tujuan dilakukannya Analisis Statistik Deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran suatu data yang dapat dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel independen dan dependen (Ghozali, 2013). Distribusi dan perilaku data sampel dapat digambarkan dari statistik deskriptif. Hal ini diperlukan untuk melihat gambaran keseluruhan sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel.

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model pada penelitian ini telah memenuhi persyaratan yaitu lolos dari uji asumsi klasik, yang mana uji asumsi klasik ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian adalah valid, dengan data yang digunakan secara teori adalah tidak bias, konsisiten, dan penaksiran koefisien regresinya efisien (Ghozali, 2009)

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis diagonal. Jika data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Tetapi jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2009).

Untuk menguji normalitas data digunakan analisis grafik, dengan cara menganalisis grafik normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Data dikatakan normal jika data tersebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sample kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan menganalisis grafik dan uji statistik. Pengujian dengan menggunakan statistik one sample kolmogorov-smirnow test (K-S). Jika nilai probalitas signifikan K-S lebih besar dari 0.05 maka data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas berfungsi untuk membuktikan atau menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling korelasi, maka variabel-variabel ini

tidak *orthogonal*. Variabel *orthogonal* adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan nol. Untuk mengetahui adanya multikolinearitas di dalam model, peneliti akan melihat *Tolerance* dan *Variance Inflation Factors* (VIF) dan tabel matrik korelasi (*coefficient correlations*) dengan alat bantu program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1 / \text{tolerance}$). Kriteria Pengambilan keputusan dengan nilai *tolerance* dan VIF adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai *tolerance* $\geq 0,10$ atau nilai VIF ≤ 10 , berarti tidak terjadi multikolinearitas.
2. Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ atau nilai VIF > 10 , berarti terjadi multikolinearitas.
- c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ atau sebelumnya. (Ghozali, 2009). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson (DW Test). Cara untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. $du < dw < 4-du$ kesimpulannya tidak ada autokorelasi
2. $dl \leq dw \leq du$ atau $4-du \leq DW < 4-dl$ kesimpulannya tidak dapat disimpulkan (inconclusive)
3. $0 < dw < dl$ atau $4-dl < dw < 4$ kesimpulannya terjadi autokorelasi.

a. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual suatu pengamatan kepengamatan yang lain. Sebuah model regresi yang baik adalah model regresi yang mempunyai data yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di studentized.

Dasar pengambilan keputusannya apabila terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka diindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik –titik yang menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009). Dalam penelitian ini, akan dilakukan uji glejser dengan cara meregresikan antar variabel independen dengan nilai absolut residualnya, jika nilai signifikan antar variabel independen dengan absolut residual $> 0,05$ maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dan sebaliknya $< 0,05$ maka terjadi masalah heteroskedastisitas.

3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel independen (Ghozali, 2011), dengan nilai antara nol dan satu, nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberi hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji Parameter Individual (Uji statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji t digunakan untuk menemukan pengaruh yang paling dominan antara masing-masing variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

1. Menentukan formulasi hipotesis

(H_0): variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

(H_a): variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2. Menentukan derajat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$)

3. Menentukan signifikansi

Nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 di tolak dan H_a di terima. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel

dependen secara parsial. Jika t hitung $< t$ tabel maka H_0 di terima dan H_a di tolak. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/ terikat (Ghozali, 2011). Untuk menguji hipotesis ini tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95 % atau taraf signifikan 5 % ($= 0,05$) dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

1. Bila (P value) $< 0,05$ maka H_0 di tolak dan H_a diterima. Artinya variabel independen secara simultan (bersama-sama) mempengaruhi variabel dependen.
2. Bila (P Value) $> 0,05$ maka H_0 di terima dan H_0 di tolak. Artinya variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi

Perusahaan Infrastruktur merupakan perusahaan yang lebih mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Utilitas merupakan kemampuan suatu barang untuk memberikan kepuasan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan Transportasi merupakan pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

B. Profil Perusahaan Sample

1. PT. Perusahaan Gas Negara Tbk

Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau biasa dikenal dengan PGN (Persero) Tbk (PGAS) didirikan tahun 1859 dengan menggunakan nama *Firma L. J. N. Eindhoven & Co. Gravenhage*. Tahun 1950, Pemerintah Belanda mengambil alih PGAS dan diberi nama *NV. Netherland Indische Gaz Maatschapij (NV. NIGM)*. Tahun 1958, Pemerintah Republik Indonesia mengambil alih dan mengubahnya menjadi Badan Pengambil Alih Perusahaan-Perusahaan Listrik dan Gas (BP3LG) yang kemudian statusnya beralih menjadi BPU-PLN pada tahun 1961.

Pada tanggal 13 Mei 1965, PGAS ditetapkan sebagai perusahaan negara yang dikenal sebagai Perusahaan Negara Gas (PN. Gas). tahun 1984, Berdasarkan Peraturan Pemerintah PN. Gas diubah menjadi perusahaan umum (Perum) dengan

nama Perusahaan Umum Gas Negara. Berdasarkan Peraturan, Perubahan terakhir PGAS diubah dari Perum menjadi perusahaan perseroan terbatas yang dimiliki oleh negara (Persero) dan namanya berubah menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero). Lokasi Kantor pusat PGAS di Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20, Jakarta 11140, Indonesia

2. PT. Cikarang Listrindo Tbk

Cikarang Listrindo Tbk (POWR) didirikan pada tanggal 28 Juli 1990, mulai beroperasi secara komersial bulan November 1993. Letak Kantor Pusat Cikarang Listrindo di World Trade Centre 1, Lantai 17, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 – 31, Jakarta 12920 – Indonesia. Telp: (62-21) 522-8122 (Hunting), Fax: (62-21) 522-4440. POWR bergerak dalam industri pusat pembangkit tenaga listrik, pemasaran, pendistribusian tenaga listrik dan agen.

3. PT. Rukun Raharja Tbk

Rukun Raharja Tbk (RAJA) didirikan pada tanggal 24 Desember 1993, mulai beroperasi bulan Februari 2002. Letak Kantor pusat RAJA di Office Park Thamrin Residences Blok A No. 01-05, Jl Thamrin Boulevard, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat 10220 – Indonesia. Telp: (62-21) 2929-1053 (Hunting), Fax: (62-21) 2357-9803.

RAJA menjalankan usahanya sebagai penyedia energi terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir. Seperti bidang jasa atau pelayanan yang meliputi jasa-jasa penunjang pertambangan minyak dan gas bumi, penyediaan tenaga listrik, konsultasi bidang pertambangan, pengelolaan kepelabuhan, bongkar muat peti kemas, pengelolaan dan penyewaan bangunan, sarana penunjang perusahaan

properti dan konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan; bidang pertambangan yang meliputi pendistribusian, penyimpanan gas dan Bahan Bakar Minyak (BBM), pengembangan, pengelolaan dan pengoperasian infrastruktur gas dan perdagangan kapasitas pipa transmisi gas dan BBM; serta kegiatan usaha penunjang yang meliputi usaha pemborongan dan perdagangan.

4. PT. Citra Nusaphala Persada Tbk

Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) didirikan pada tanggal 13 April 1987 dan kegiatan operasi komersialnya dimulai sejak 1990. Kantor pusat CMNP terletak di Gedung Citra Marga Nusaphala Persada, Jalan Yos Sudarso Kav 28, Jakarta 14350 – Indonesia. Telp: (62-21) 6530-6930 (Hunting), Fax: (62-21) 6530-6931. CMNP bergerak dibidang melakukan investasi, proyek jalan tol, dan jasa penunjang di bidang jalan tol lainnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta menjalankan usaha di bidang lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan tol.

5. PT. Jasa Armada Indonesia Tbk

Jasa Armada Indonesia Tbk (IPC Marine Service) (IPCM) berdiri pada tanggal 10 Juli 2013. Kantor pusat IPC Marine Service berada di Jl. Ancol Baru Raya No.1 Pademangan Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14430 – Indonesia. IPC Marine Service merupakan Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang bergerak di bidang layanan pemanduan & penundaan kapal, angkutan laut dan layanan maritim. Tahun 1960 Mulai beroperasi sebagai unit usaha Perusahaan Nasional (PN) Pelabuhan, layanan pemanduan & penundaan. Tahun 1992 diubah menjadi unit usaha PT Pelabuhan Indonesia II

(Persero). Dengan identitas baru yang diluncurkan oleh Pelindo II tahun 2012 sebagai IPC, pada bulan Juli 2013 unit usaha layanan pemanduan & penundaan dispin-off diubah menjadi PT Jasa Armada Indonesia dengan nama dagang IPC Marine Service. Telp: (62-21) 430-6789 (Hunting), Fax: (62-21) 436-6789.

IPCM bergerak dalam bidang usaha jasa penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kapal, penumpang, barang, dan kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhan. Kegiatan utama IPC Marine Service adalah bidang layanan pemanduan dan penundaan kapal.

6. PT. Nusantara Infrastructure Tbk

Nusantara Infrastructure Tbk (META) didirikan pada 1 September 1995 dengan nama PT Sawitia Bersama Darma dan beroperasi secara komersial mulai tanggal 02 Januari 2000. Lokasi Kantor pusat META yaitu di Menara Equity, Lantai 38, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190 – Indonesia. Telp : (62-21) 515-0100 (Hunting), Fax : (62-21) 515-1221. Perubahan nama beberapa kali dilakukan META, yaitu seperti PT Sawitia Bersama Darma, 01-Sept-1995, PT Wahana Tradindo Jaya, 10-Jun-1998, Metamedia Technologies Tbk, 22-Feb-2001, Nusantara Infrastructure Tbk, 04-Jul-2006.

META bergerak dalam bidang jasa, perdagangan dan pembangunan yang berhubungan dengan bidang usaha infrastruktur, pertambangan, minyak dan gas bumi. Kegiatan utama META adalah melakukan investasi pada beberapa perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan jalan tol (Jakarta dan Makassar), jasa pelabuhan, perdagangan, jasa dan pembangunan.

7. PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk

Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk atau lebih dikenal dengan Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) yang pada mulanya merupakan bagian dari *Post en Telegraafdienst*, yang didirikan pada tahun 1884. Tahun 1991, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, status Telkom diubah menjadi perseroan terbatas milik negara (Persero). Lokasi Kantor pusat Telkom terletak di Jalan Japati No. 1, Bandung, Jawa Barat. Telp: (62-22) 452-1108, 452-7252 (Hunting), Fax: (62-22) 720-3247.

Telkom Indonesia bergerak dalam bidang menyelenggarakan jaringan dan jasa informatika, telekomunikasi, serta optimalisasi sumber daya perusahaan. Kegiatan usaha utama dari Telkom Indonesia yaitu menyediakan layanan telekomunikasi yang mencakup sambungan telepon kabel tidak bergerak dan telepon nirkabel tidak bergerak, komunikasi selular, layanan jaringan dan interkoneksi serta layanan internet dan komunikasi data..

8. PT. Adi Sarana Armada Tbk

Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) didirikan tanggal 17 Desember 1999 dengan nama PT Quantum Megahtama Motor yang memulai kegiatan komersial tahun 2003. Lokasi Kantor pusat ASSA terletak di Gedung Graha Kirana, Lt.6, Jl. Yos Sudarso No.88, Sunter, Jakarta Utara 14350 – Indonesia. ASSA saat ini memiliki 20 kantor cabang dan 11 kantor perwakilan di berbagai wilayah Indonesia. Telp: (62-21) 6530-8811 (Hunting), Fax: (62-21) 6530-8822.

Adi Sarana Armada Tbk merupakan bagian dari Grup Triputra yang mulai beroperasi tahun 2003 dengan merek Adira Rent dan kemudian berubah menjadi

ASSA Rent tahun 2010. Grup Triputra merupakan kelompok usaha yang dikelola dan dimiliki oleh Theodore Permadi Rachmat, dahulu Direktur Utama Astra International Tbk (ASII) (1984-2002). Grup Triputra bergerak di berbagai sektor usaha agribisnis, manufaktur, pertambangan dan jasa perdagangan.

Kegiatan ASSA yaitu menjalankan jasa penyewaan kendaraan bermotor/alat transportasi darat, jual beli kendaraan bekas, jasa pengurusan transportasi/logistik (PT Adi Sarana Logistik), balai lelang (PT Adi Sarana Lelang), dan jasa penyediaan juru mudi (PT Duta Mitra Solusindo)

9. PT. Blue Bird Tbk

Blue Bird Tbk (BIRD) didirikan pada tanggal 29 Maret 2001 dan kegiatan komersial dimulai tahun 2001. Lokasi Kantor pusat Blue Bird terletak di Jl. Bojong Indah Raya No. 6, Kel. Rawabuaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat. Telp: (62-21) 798-9000, 798-9111 (Hunting), Fax: (62-21) 798-9102.

Blue Bird bergerak dalam bidang pengangkutan darat, jasa, perdagangan, industri dan perbengkelan. Kegiatan usaha utama Blue Bird yaitu bergerak dalam bidang transportasi taksi (Blue Bird dan Pusaka), taksi eksekutif (Silver Bird), kendaraan limusin dan sewa mobil serta bus (Golden Bird dan Big Bird).

10. PT. Buana Lintas Lautan Tbk

Buana Lintas Lautan Tbk (BULL) dulunya bernama Buana Listya Tama Tbk yang didirikan tanggal 12 Mei 2005 dan beroperasi secara komersial mulai 2005. Lokasi Kantor pusat BULL terletak di Danatama Square II, Jl. Mega Kuningan Timur, Blok C6 Kav. 12A, Jakarta Selatan 12950 – Indonesia. Telp: (62-21) 3048-5700 (Hunting), Fax: (62-21) 3048-5701. BULL bergerak dalam

bidang perkapalan dalam dan luar negeri dengan menggunakan berbagai jenis kapal tanker minyak, gas, kimia, dan FPSO/FSO (*Floating Production Storage and Offloading/Floating Storage and Offloading*).

11. PT. Cardig Aero Services Tbk

Cardig Aero Services Tbk yang dulunya bernama PT Cardig Air Services. CASS didirikan pada tanggal 16 Juli 2009 dan beroperasi secara komersil mulai tahun 2010. Lokasi Kantor pusat CASS terletak di Menara Cardig, Jl. Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650 – Indonesia. Telp: (62-21) 8087-5050 (Hunting), Fax: (62-21) 8088-5001

CASS bergerak dalam bidang perdagangan, keagenan, perwakilan, jasa, angkutan, dan industri. Kegiatan utama CASS bersama anak usahanya saat ini adalah menyediakan berbagai jasa layanan untuk penerbangan, seperti jasa pergudangan, jasa penunjang penerbangan, jasa katering, jasa perbengkelan penerbangan, jasa manajemen fasilitas dan pelatihan penerbangan.

12. PT. Humpus Intermoda Transportasi Tbk

Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) didirikan pada tanggal 21 Desember 1992 dan kegiatan usaha komersial dimulai sejak tanggal 01 Januari 1993. Lokasi Kantor pusat HITS yaitu di Gedung Granadi, lantai 7, Jln. H.R. Rasuna Said Kav. X-1, No. 8-9, Jakarta 12950.

HITS bergerak dibidang pengiriman gas alam cair (LNG), minyak mentah, bahan bakar minyak, bahan kimia, peti kemas, batu bara serta kargo laut lainnya. HITS juga menyediakan anak buah kapal dan jasa manajemen kepada pemilik-pemilik kapal.

13. PT. ICTSI Jasa Prima Tbk

ICTSI Jasa Prima Tbk (KARW) didirikan pada tanggal 18 Februari 1978 dengan nama PT Karwell Indonesia Knitting & Garment Industry. kegiatan usaha komersialnya dimulai pada tahun 1978. Lokasi Kantor pusat KARW terletak di Gedung Graha Kirana, Lantai 7, Suite 701, Jl. Yos Sudarso No.88, Jakarta Utara. Telp : (62-21) 6531-4710 (Hunting), Fax : (62-21) 6531-4711.

Perubahan nama beberapa kali dilakukan oleh KARW seperti PT Karwell Indonesia Knitting & Garment Industry pada 18 februari 1978, Karwell Indonesia Tbk pada tahun 1994, Maharlika Indonesia Tbk pada tahun 2012, dan ICTSI Jasa Prima Tbk, 2012. Pada saat KARW masih bernama Maharlika Indonesia Tbk, bidang usaha yang dijalankan adalah penyewaan bangunan pabrik.

KARW bergerak dalam bidang pengembangan, pembangunan, dan pengoperasian sarana dan prasarana logistik maritim serta jasa-jasa yang terkait. Kegiatan usaha utama KARW adalah jasa pemeliharaan, perawatan, pengoperasian dan pengusahaan sarana dan prasarana maritime

14. PT. Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk

Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk (NELY) didirikan menggunakan nama PT Nelly Dwi Putri Chemical pada tanggal 05 Februari 1977. kegiatan usaha komersialnya dimulai pada tahun 1977. Lokasi Kantor pusat NELY terletak di Jalan Majapahit No. 28A, Jakarta Pusat 10160.

NELY didirikan awalnya bergerak dibidang perdagangan umum dan perindustrian, yaitu pada industri kimia dengan memproduksi lem untuk digunakan di industri pengolahan plywood (kayu lapis). Kemudian tanggal 20 Juli

1989 nama perusahaan dan bidang usaha diubah menjadi PT Pelayaran Nelly Dwi Putri sedangkan bidang usahanya menjadi penyedia jasa angkutan laut, agen perantara dan pencari muatan (canvasing), penyewaan kapal (chartering), dan jasa penunjang angkutan laut lainnya.

NELY bergerak dibidang usaha jasa angkutan laut. Kegiatan utama yang dijalankan NELY adalah jasa pelayaran dan pengangkutan di dalam dan luar negeri serta jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal yang dijalankan oleh anak usaha (PT Permata Barito Shipyard & Engineering).

15. PT. Sillo Maritime Perdana Tbk

Sillo Maritime Perdana Tbk (SHIP) didirikan pada tanggal 01 Juni 1989. Beroperasi secara komersial mulai tahun 1990. Letak kantor pusat Sillo Maritime yaitu di The City Tower Building, Lantai 6, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Jakarta Pusat 10310 – Indonesia. Telp: (62-21) 3199-6196 (Hunting), Fax: (62-21) 3199-6169. SHIP bergerak dalam bidang Pelayaran. Kegiatan usaha utama Sillo Maritime adalah pelayaran penunjang industri hulu minyak dan gas.

16. PT. Samudera Indonesia Tbk

Samudera Indonesia Tbk (SMDR) didirikan tanggal 13 Nopember 1964. Beroperasi secara komersial mulai tahun 1964. Letak Kantor pusat SMDR yaitu di Gedung Samudera Indonesia, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 35, Jakarta Barat 11480 – Indonesia, dengan kantor cabang di seluruh kota pelabuhan utama di Indonesia. Telp: (62-21) 5348-0088, 534-7210, 530-4185, 549-4993 (Hunting), Fax: (62-21) 534-7171.

SMDR bergerak dibidang pelayaran termasuk pengangkutan barang dengan kapal, dan kegiatan lainnya. Kegiatan utama dari Samudera Indonesia dan anak usahanya yaitu transportasi kargo dan logistik terintegrasi pada lini bisnis yang dimilikinya

17. PT. Soechi Lines Tbk

Soechi Lines Tbk (SOCI) didirikan pada tanggal 13 Agustus 2010 dan dia memulai kegiatan komersil pada tahun 2012. Lokasi Kantor pusat Soechi Lines yaitu di Sahid Sudirman Center, Lt. 51, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220-Indonesia. Telp: (62-21) 8086-1000 (Hunting), Fax: (62-21) 8086-1001

SOCI abergerak dalam bidang perdagangan impor dan ekspor, jasa konsultasi, pembangunan, transportasi, percetakan, pertanian, perbengkelan dan industri lainnya. Kegiatan utama Soechi Lines adalah bergerak di bidang jasa konsultasi manajemen sedangkan anak usaha bergerak di bidang pelayaran dan pembangunan kapal

18. PT. Pelayaran Tempura Emas Tbk

Pelayaran Tempuran Emas Tbk (TMAS) atau Temas Line didirikan dengan menggunakan nama PT Tempuran Emas pada tanggal 17 September 1987 . Beroperasi secara komersial pada tahun 1988. Lokasi Kantor pusat Temas Line terletak di Jl. Yos Sudarso Kav. 33, Sunter Jaya, Jakarta Utara 14350 – Indonesia. Telp: (62-21) 430-2388 (Hunting), Fax: (62-21) 4393-8658. Temas Line bergerak dalam bidang pengangkutan, baik domestik maupun internasional.

19. PT. Trans Power Marine Tbk

Trans Power Marine Tbk (TPMA) didirikan pada tanggal 24 Januari 2005 dan kegiatan komersialnya dimulai pada bulan Maret 2005. Alamat Kantor Pusat TPMA yaitu di Gedung Artha Graha, Lt 20, suite #20-01, Sudirman Central Business District (SCBD), Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 – Indonesia. Telp : (62-21) 515-5551 (Hunting), Fax : (62-21) 515-3385/86.

TPMA bergerak dalam bidang jasa pelayaran. Kegiatan usaha utama TPMA adalah jasa pengangkutan komoditas barang curah (batu bara, nikel, iron ore, gypsum, sand, wood chip, dan lain-lain).

20. PT. Trada Alam Minera Tbk

Trada Maritime Tbk (TRAM) didirikan pada tanggal 26 Agustus 1998 dengan nama PT Panji Adi Samudera. Usahanya dimulai secara komersial pada bulan September 2000. Lokasi dari Kantor pusat TRAM yaitu di gedung Trada, Jl. Kyai Maja No. 4, Kebayoran Baru, Jakarta.

TRAM bergerak dalam bidang pelayaran dan penyelenggaraan angkutan laut. Kegiatan usaha TRAM meliputi angkutan muatan cair (liquid cargo), muatan curah kering (bulk carrier), gas alam cair (liquefied natural gas/LNG), armada akomodasi (self propelled accommodation barge), serta sejumlah kapal penunjang seperti kapal tunda dan tongkang (tug and barge).

21. PT. Weha Transportasi Indonesia

Weha Transportasi Indonesia Tbk (White Horse) yang dulunya bernama Panorama Transportasi Tbk (WEHA) didirikan pada tanggal 11 September 2001.

Usahanya dimulai secara komersial tahun 2001. Lokasi Kantor pusat WEHA di Graha White Horse, Jl. Husein Sastranegara No. 175, Rawa Bokor, Tangerang 15125 – Indonesia. Telp: (62-21) 2967-5555 (Hunting), Fax: (62-21) 2967-5005

WEHA bergerak dalam di bidang perdagangan, jasa penyewaan kendaraan bermotor dan jasa angkutan darat yang meliputi transportasi penumpang dan barang.

22. PT. Bali Towerindo Sentra Tbk\

Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI) atau Balitower didirikan pada tanggal 06 Juli 2006. kegiatan komersial dimulai pada bulan Juli 2008. Balitower berkantor pusat di Jalan Sunset Road No. 5, Kuta-Bali 80361 dan kantor perwakilan di Wisma KEIAI, Lantai 22, Jl. Jend. Sudirman Kav. 3, Jakarta 10220 – Indonesia. Kantor pusat: Telp: (62-361) 767-629 (Hunting), Fax: (62-361) 766-059 dan kantor perwakilan: Telp: (62-21) 5790-5788 (Hunting), Fax: (62-21) 5790-5789.

Balitower bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi. Kegiatan usaha utama Balitower yaitu mengelola dan menyewakan bangunan menara atau menara telekomunikasi serta sarana telekomunikasi langsung maupun melalui anak usaha, dengan lokasi menara tersebar di Propinsi Bali.

23. PT. Bukaka Teknik Utama Tbk

Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK) didirikan pada tanggal 25 Oktober 1978. Usahanya mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1981. BUKK berkantor pusat dan fasilitas pabriknya di Bukaka Industrial Estate, Jl. Raya

Bekasi Narogong, KM 19,5, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat 16820 – Indonesia.
Telp: (62-21) 823-2323 (Hunting), Fax: (62-21) 823-1150

BUKK bergerak dalam di bidang pembuatan dan penyediaan peralatan khusus dan bisnis lain yang termasuk di dalam industri konstruksi. Kegiatan usaha utama Bukaka, yaitu Steel Tower (pembangunan transmisi tegangan listik hingga menara komunikasi), Steel Bridge (produsen jembatan rangka), Power Generation (pembangkit listrik), Boarding Bridge (produksi garbarata), Plant System, Road Construction Equipment (memproduksi beragam peralatan jalan) Offshore Maintenance & Services (menangani kebutuhan konstruksi serta pemeliharaan pada industri minyak dan gas bumi), Oil & Gas Equipment (memproduksi alat-alat minyak dan gas), Special Purpose Vehicles (memproduksi Truck) dan Galvanize

24. PT. Inti Bangun Sejahtera Tbk

Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) didirikan pada tanggal 28 April 2006 dan kegiatan usahanya dimulai secara komersial pada tahun 2006. Kantor pusat IBST berlokasi di Jalan Riau No. 23, Menteng, Jakarta Pusat 10350 – Indonesia. Telp : (62-21) 3193-5919 (Hunting), Fax : (62-21) 390-3473.

IBST bergerak dalam bidang penyedia jasa menara telekomunikasi. Kegiatan utama IBST yaitu menyediakan jasa untuk beberapa operator telekomunikasi

25. PT. Indika Energy Tbk

Indika Energy Tbk (INDY) didirikan pada tanggal 19 Oktober 2000. kegiatan usahanya dimulai secara komersial tahun 2004. Kantor pusat Indika

berada di Gedung Mitra, Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 21, Jakarta 12930 – Indonesia. Telp: (62-21) 2557-9888 (Hunting), Fax: (62-21) 2557-9890).

INDY bergerak di bidang perdagangan, pembangunan, pertambangan, pengangkutan dan jasa. kegiatan usaha INDY saat ini yaitu perusahaan energi terintegrasi yang mencakup sektor sumber daya energi, jasa energi, dan infrastruktur energi dengan usaha utama di bidang batubara.

26. PT. Tower Bersama Infrastructure Tbk

Tower Bersama Infrastructure Tbk yang dulunya bernama PT Banyan Mas (TBIG) didirikan pada tanggal 8 Nopember 2004. TBIG berlokasi di The Convergence Indonesia, Lt. 11 Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Boulevard Barat, Karet Kuningan – Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 – Indonesia. Telp: (62-21) 8062-9300 (Hunting), Fax: (62-21) 2157-2015.

TBIG bergerak dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi yaitu jasa persewaan dan pengelolaan menara Base Transceiver Station (BTS), jasa konsultasi bidang instalasi telekomunikasi, dan melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain. Kegiatan utama yang dilakukan Tower Bersama adalah melakukan investasi atau penyertaan pada anak usaha terutama yang bergerak dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi.

27. PT. Sarana Menara Nusantara Tbk

Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) didirikan pada tanggal 2 Juni 2008. Usahanya mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 2 Juni 2008. TOWR berkantor pusat di Jl. Ahmad Yani No. 19 A, Kudus 59317, Jawa Tengah dan kantor cabangnya berlokasi di Menara BCA, lantai 55, Jl. M.H. Thamrin No.1,

Jakarta 10310, Indonesia. Telp : (62-291) 431-691 (Hunting), Fax : (62-291) 431-718. TOWR bergerak dalam bidang jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak dan melakukan investasi pada perusahaan lain. Usaha utama TOWR dan Anak Usaha adalah penyewaan menara dan pemancar.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan melihat pengaruh dari 4 variabel independen yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* yang merupakan variabel dependen. Perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bei tahun 2017-2018 dengan berbagai kriteria yang telah dijabarkan di bab sebelumnya, yang menjadi objek dari penelitian ini. Maka, diperoleh sampel penelitian ini sebanyak 54 sampel data dari 27 perusahaan dengan 2 tahun pengamatan.

Bab ini akan menyajikan hasil dari analisis data berdasarkan pengamatan dari sejumlah variabel yang digunakan dalam model regresi untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Selain itu akan dibahas juga secara beruntun gambaran umum dari hasil penelitian pengujian asumsi klasik, pengujian hipotesis, regresi berganda dan koefisien determinasi.

1. Statistik Deskriptif

Menggunakan bantuan dari SPSS versi 22, diperoleh data statistik deskriptif yang memberikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian, yaitu nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. Tabel V.1 menunjukkan statistik, deskriptif dari variabel- variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel V.1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ln Assets	54	26,43	32,96	29,4593	1,61161
DER	54	-1,75	7,04	1,3319	1,46764
ROA	54	,00	,17	,0585	,04138
CSR	54	43,96	53,85	47,9781	2,17788
Cash ETR	54	-7,60	1,31	,0038	1,14231
Valid N (listwise)	54				

Sumber : Output SPSS Versi 22

Berdasarkan tabel V.1 diatas dapat diketahui bahwa nilai N atau jumlah data yang dimiliki dalam penelitian ini berjumlah 54 sampel. Maka diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. *Tax Avoidance (cash ETR)* sebagai variabel dependen mempunyai nilai rata-rata (*Mean*) sebesar 0,0038; dengan nilai minimum -7,60; nilai maksimum 1,31 dan nilai standar deviasi sebesar 1,14231.
- b. Ukuran Perusahaan (*Ln Assets*) yang merupakan variabel independen atau X1 memperoleh nilai rata-rata sebesar 29,4593; nilai minimum 26,43; dan nilai maksimum 32,96 sedangkan nilai standar deviasi yang diperoleh sebesar 1,61161.
- c. *Leverage (DER)* yang juga merupakan variabel independen atau X2 memperoleh nilai rata-rata sebesar 1,3319; nilai minimum -1,75; nilai maksimum 7,04 dan nilai standar deviasi sebesar 1,46764.
- d. Profitabilitas (ROA) sebagai X3 Memperoleh nilai rata-rata sebesar 0,0585; nilai minimum 0,00; dan nilai maksimum 0,17 sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 0,04138.

e. *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang merupakan variabel independen terakhir atau X4 memperoleh nilai rata-rata sebesar 47,9781 dengan nilai minimum sebesar 43,96 dan nilai maksimum sebesar 53,85. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 2,17788

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tujuan dari Uji normalitas ini yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan pengujian *kolmogorov-simirnov test* dengan bantuan *software SPSS 22 For Windows*. Data yang digunakan dalam uji normalitas ini berjumlah 54, adapun hasil uji normalitas data tersaji pada tabel V.2

Tabel V.2
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,14477950
Most Extreme Differences	Absolute	,106
	Positive	,084
	Negative	-,106
Test Statistic		,106
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

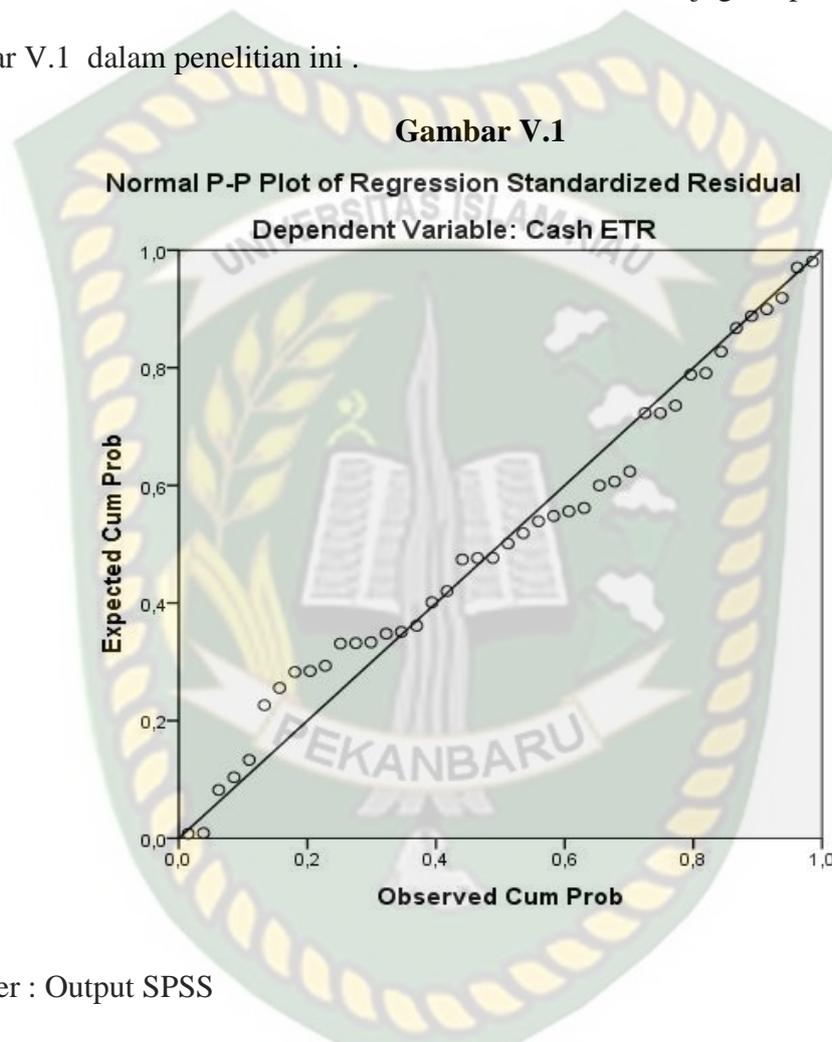
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel V.2 dapat diketahui bahwa pengujian terhadap nilai residual persamaan regresi memberikan nilai probabilitas *asympt. Sig (2-tailed)*

sebesar 0,200. Data berdistribusi normal apabila nilai *asyp. Sig (2-tailed)* $> 0,05$. Nilai yang diperoleh $0,200 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Selain itu sebaran data juga dapat dilihat dari gambar V.1 dalam penelitian ini .



Sumber : Output SPSS

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa titik penyebaran data berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Multikolinearitas

Dalam model regresi harus memenuhi persyaratan, salah satunya yaitu tidak adanya multikolinearitas. Uji gejala multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi antara variabel independen. Metode yang digunakan untuk

mendeteksi adanya multikolinearitas yaitu dengan menggunakan nilai VIF (*variance Inflation Factor*), jika nilai *tolerance* >0,10 dan VIF <10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapatnya multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai *tolerance* <0,10 dan VIF >10, maka terdapat gangguan multikolinearitas pada penelitian tersebut.

Tabel V.3
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,623	,927		-,672	,505		
	Ln Assets	,034	,016	,346	2,143	,039	,878	1,139
	DER	,016	,036	,074	,454	,652	,863	1,158
	ROA	-,268	,579	-,072	-,463	,646	,941	1,063
	CSR	-,003	,015	-,036	-,218	,829	,853	1,172

a. Dependent Variable: Cash ETR
Sumber : Output SPSS

Berdasarkan tabel V.3 hasil dari uji multikolinearitas diketahui bahwa nilai *tolerance* semua variabel independen memiliki nilai diatas 0,10 yaitu untuk variabel ukuran perusahaan (*Ln Assets*) memperoleh nilai sebesar 0,878; *leverage* (*DER*) sebesar 0,863; Profitabilitas (*ROA*) sebesar 0,941 dan *Corporate Social Responsibility* (*CSR*) sebesar 0,853. Dan hasil dari perhitungan *Variabel Inflasi Factor* (VIF) menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki VIF lebih besar dari 10. Hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.3 *Coefficients* dimana ukuran perusahaan (*Ln Assets*) memperoleh nilai sebesar 1,139; *leverage* (*DER*) sebesar 1,158; Profitabilitas (*ROA*) sebesar 1,063 dan *Corporate Social Responsibility* (*CSR*) sebesar 1,172. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa variabel independen yang digunakan dalam model regresi penelitian ini terbebas dari multikolinearitas atau objektif dan dapat dipercaya.

c. Autokorelasi

Uji autokorelasi ini berfungsi untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara nilai residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Jenis pengujian yang digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam penelitian ini yaitu dengan *Durbin-watson Test*. Dimana hasil pengujian autokorelasi penelitian ini dapat dilihat pada tabel V.4.

Tabel V.4
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,392 ^a	,154	,062	,15240	1,917

a. Predictors: (Constant), CSR, ROA, Ln Assets, DER

b. Dependent Variable: Cash ETR

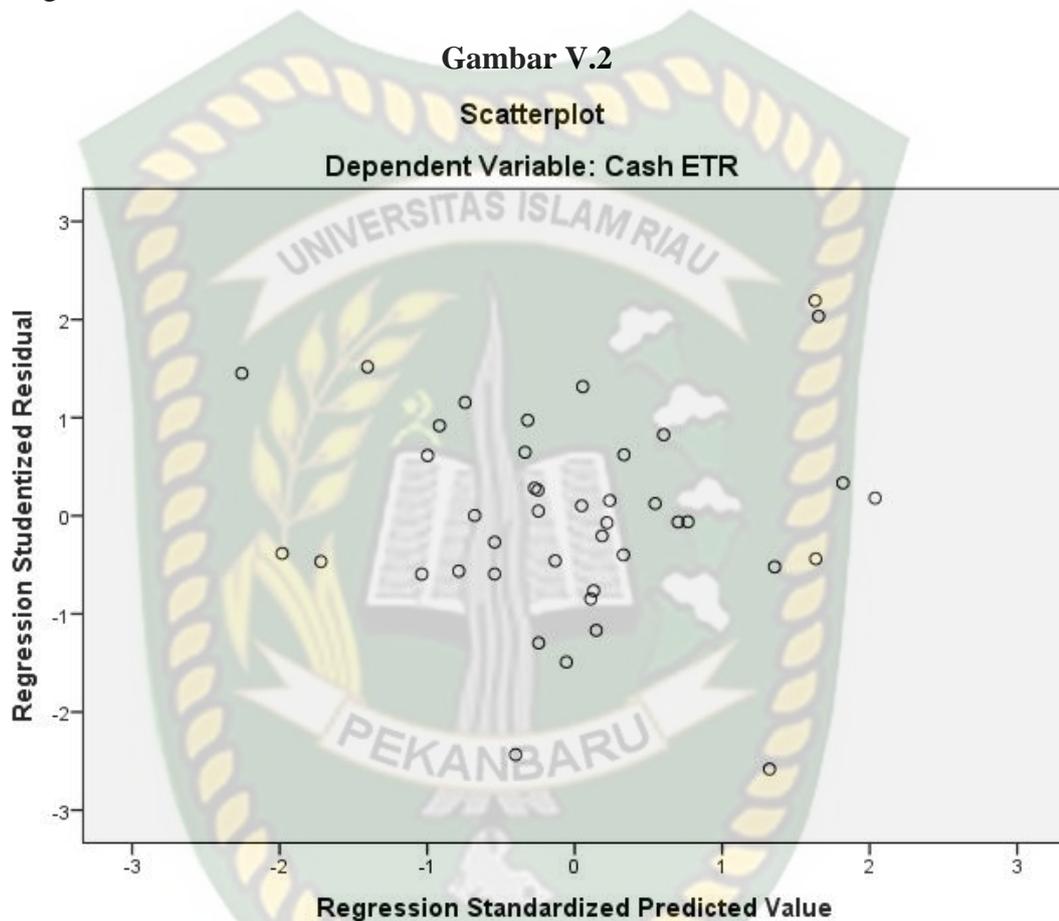
Sumber : Output SPSS

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *Durbin-watson (DW) test* sebesar 1,917. Angka ini memenuhi ketentuan DW yaitu $du < dw < 4-du$ yang persamaannya menjadi $1,7202 < 1,917 > 2,279$ yang artinya tidak terdapat autokorelasi antara variabel dalam model regresi.

d. Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian terhadap heteroskedastisitas dilakukan plot residual yaitu dengan melihat sebaran residual untuk setiap pengamatan terhadap

nilai prediksi Y. Jika ditemukan plot residual membentuk pola tertentu maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat dari gambar V.2.



Sumber : Output SPSS

Berdasarkan gambar V.2 dapat dilihat bahwa data residual pada kedua model regresi menyebar baik diatas maupun dibawah titik 0 dan juga tidak memiliki pola tertentu. Dengan demikian model regresi yang diajukan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda (*multiple linier regression method*). Analisis regresi liner

berganda ini digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan variabel dependen dengan variabel independen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 yaitu Ukuran Perusahaan (*Ln Asset*), *Leverage (DER)*, Profitabilitas (*ROA*) dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah *Tax Avoidance (Cash ETR)*.

Berdasarkan tabel V.3 sebelumnya, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = -0,623 + 0,034 X_1 + 0,016 X_2 - 0,268 X_3 - 0,003 X_4 + e$$

Keterangan :

Y	=	Tax Avoidance
	=	Konstanta
1 – 4	=	Koefisien regresi variabel independen
X ₁	=	Ukuran Perusahaan
X ₂	=	<i>Leverage</i>
X ₃	=	Profitabilitas
X ₄	=	<i>Corporate Social Responsibility</i>
e	=	Standar Error

Persamaan regresi penelitian diatas menunjukkan arah hubungan yang ditimbulkan oleh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat sebagai berikut :

1. Konstanta bernilai negatif yaitu -0,623. Hal ini menunjukkan bahwa *tax avoidance* akan bernilai -0,623 ketika semua variabel independennya (bebas) dianggap bernilai tetap atau konstanta.

2. Koefisien Ukuran perusahaan (X_1) bernilai positif yaitu 0,034. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan ukuran perusahaan sebesar satu satuan, maka akan diikuti kenaikan nilai *tax avoidance* (Y) sebesar 0,034 dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Koefisien yang bernilai positif ini menunjukkan bahwa terjadinya hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan *tax avoidance*. Semakin meningkat nilai ukuran perusahaan maka akan semakin meningkat nilai *tax avoidance*.
3. Koefisien *leverage* (X_2) bernilai positif yaitu 0,016. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan *leverage* sebesar satu satuan, maka akan diikuti kenaikan nilai *tax avoidance* (Y) sebesar 0,016 dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Koefisien yang bernilai positif ini menunjukkan bahwa terjadinya hubungan positif antara *leverage* dengan *tax avoidance*. Semakin meningkat nilai *leverage* maka akan semakin meningkat nilai *tax avoidance*.
4. Koefisien profitabilitas (X_3) bernilai negatif yaitu -0,268. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan Profitabilitas sebesar satu satuan, maka akan diikuti penurunan nilai *tax avoidance* (Y) sebesar 0,268 dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Koefisien yang bernilai negatif ini menunjukkan bahwa terjadinya hubungan negatif antara profitabilitas dengan *tax avoidance*. Semakin meningkat nilai profitabilitas maka akan semakin menurun nilai *tax avoidance*.
5. Koefisien *Corporate Social Responsibility* atau CSR (X_4) bernilai negatif yaitu -0,003. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan CSR

sebesar satu satuan, maka akan diikuti penurunan nilai *tax avoidance* (Y) sebesar 0,003 dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Koefisien yang bernilai negatif ini menunjukkan bahwa terjadinya hubungan negatif antara CSR dengan *tax avoidance*. Semakin meningkat nilai CSR maka akan semakin menurun nilai *tax avoidance*.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F ini bertujuan untuk menguji apakah model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang layak digunakan atau tidak. Kemudian uji F juga bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini tingkat kepercayaan yang digunakan 95 % atau taraf signifikan sebesar 5 % ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar dari pada nilai F tabel maka hipotesis alternatif. Dimana menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap nilai variabel dependen. Hasil dari uji simultan F ini dapat dilihat pada tabel V.5

Tabel 5.5
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,156	4	,039	1,681	,175 ^b
Residual	,859	37	,023		
Total	1,016	41			

a. Dependent Variable: Cash ETR

b. Predictors: (Constant), CSR, ROA, Ln Assets, DER

Sumber : Output SPSS

Dapat diketahui dari tabel V.5 bahwa nilai F_{hitung} sebesar 1,681 dan signifikan pada sebesar 0,175 . Dengan menggunakan Tingkat alfa 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan bahwa nilai $sig. 0,175 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility* secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2018.

b. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui signifikan secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen, dengan cara mengasumsikan bahwa variabel independen lainnya konstan. Dasar dari penolakan atau penerimaan hipotesis dilihat dari nilai signifikannya. Jika nilai signifikannya dibawah 0,05 maka hipotesis diterima. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel V.3 sebelumnya yang menunjukkan hasil uji parsial dari data yang diteliti. Hasil tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Variabel independen ukuran perusahaan (X_1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,143 dan nilai signifikan sebesar 0,039 ($<0,05$) yang berarti bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* diterima.
2. Variabel independen *leverage* (X_2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,454 dan nilai signifikan 0,652 ($>0,05$) yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_a

ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ditolak.

3. Variabel independen selanjutnya adalah profitabilitas dimana dia memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,463 dan nilai signifikan 0,646 ($>0,05$) yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ditolak .
4. Variabel independen terakhir yaitu *Corporate Social Responsibility* dimana dia memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,218 dan nilai signifikan 0,829 ($>0,05$) yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ditolak.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengetahui kemampuan dari variabel independen (bebas) dalam menjelaskan variabel dependen (terikat). Nilai determinasi ditentukan dengan nilai *Adjusted R Square*. Nilai koefisiennya antara 1 dan 0, jika hasil lebih mendekati 0 maka kemampuan dari variabel-variabel sungguh terbatas. Tetapi jika hasilnya lebih mendekati angka 1 maka variabel-variabel independen (bebas) memberikan hampir semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (terikat). Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel V.4 yang menunjukkan nilai *adjust R Square* sebesar 0,062. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *tax avoidance (cash ETR)* dapat dijelaskan sebesar 6,2 % oleh variabel ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan *Corporate social responsibility* dan sisanya sebesar 93,8 % dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

Dalam penelitian ini hipotesis pertama yaitu untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Nilai signifikan menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Setiap perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar maka akan berpeluang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), hal ini disebabkan perusahaan besar lebih cenderung mempunyai total aset yang lebih besar dan mengindikasikan mempunyai laba yang lebih tinggi. Hal ini juga yang mendorong perusahaan untuk lebih mengatur perpajakan, salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Detiawan (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena, perusahaan besar akan mendapatkan perhatian yang lebih

besar dari pemerintah yang disebabkan laba yang diperolehnya. Sehingga mereka juga sering menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai dengan aturan perpajak yang berlaku.

2. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*

Hipotesis kedua yaitu untuk menguji Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*. Nilai signifikan menunjukkan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ditolak.

Leverage adalah tingkat utang yang digunakan untuk melakukan pembiayaan dalam perusahaan. Apabila komposisi pembiayaan dalam perusahaan menggunakan utang maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. Penggunaan utang dalam perusahaan dapat digunakan untuk menghemat pembayaran pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurangan penghasilan kena pajak, hal ini dinyatakan dalam *teori trade off*.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan sukartha (2014) yang juga menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Tetapi, Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*

Hipotesis ketiga yaitu untuk menguji Pengaruh profitabilita terhadap *tax avoidance*. Nilai menunjukkan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh

terhadap *Tax Avoidance*. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ditolak .

Hal ini disebabkan karena Profitabilitas (*ROA*) menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Tingkat profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan entitas dalam menghasilkan laba yang semakin tinggi. Apabila laba suatu perusahaan semakin tinggi maka semakin besar pula perhatian yang mereka terima termasuk perhatian dari pemerintah , hal ini jugalah yang membuat mereka mendapatkan perhatian fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai dengan aturan perpajak yang berlaku dan menyebabkan semakin rendahnya tindakan *Tax Avoidance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyansyah (2014) yang juga menunjukkan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tetapi, Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) yang menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4. Pengaruh *Corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*

Pengujian hipotesis keempat bertujuan untuk menguji Pengaruh *Corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*. Nilai signifikan menunjukkan bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ditolak.

Hal ini dikarenakan CSR merupakan tindakan dari *tax avoidance*. CSR memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak oleh

setiap perusahaan, caranya dengan menekan laba yang diperoleh oleh perusahaan serta informasi CSR yang diungkapkan dalam laporan belum tentu sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Sehingga dalam laporan tahunan perusahaan tingkat pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial tidak bisa dijadikan patokan dalam tinggi rendahnya tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan.

Menurut Hoi et al, 2013 CSR tidak hanya memperhitungkan ekonomi tetapi juga lingkungan, sosial, dan dampak lain dari tindakan yang dilakukan perusahaan sendiri sebagai bentuk tanggung jawab kepada para stakeholder. Tindakan penghindaran pajak dipandang sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak bertanggung jawab oleh publik, oleh karena itu tindakan penghindaran pajak tidak konsisten dengan CSR

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yoehana (2013) yang menghasilkan bahwa ketika perusahaan semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukannya.

5. Pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan *Corporate social responsibility* terhadap tax avoidance

Pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan *Corporate social responsibility* terhadap tax avoidance dapat diketahui dari uji F atau hasil simultan yaitu nilai signifikan menunjukkan bahwa hipotesis kelima ditolak. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility* secara bersama-sama

(simultan) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2018.

Hal ini dikarenakan variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel *leverage*, profitabilitas, dan *Corporate social responsibility* sudah tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dalam pengujian parsialnya. Sehingga besar kemungkinan hasil yang diperoleh tidak berpengaruh. Setelah dilakukannya pengujian simultan maka terbukti bahwa variabel ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility* secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Selanjutnya hasil analisis regresi linier berganda juga menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,062. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *tax avoidance (cash ETR)* dapat dijelaskan sebesar 6,2 % oleh variabel ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan *Corporate social responsibility* dan sisanya sebesar 93,8 % dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan melihat pengaruh dari 4 variabel independen yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* yang merupakan variabel dependen. Perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bei tahun 2017-2018. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan diperoleh beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengujian secara parsial variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2018.
2. Berdasarkan pengujian secara parsial variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2018.
3. Berdasarkan pengujian secara parsial variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2018.
4. Berdasarkan pengujian secara parsial variabel *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2018.

5. Berdasarkan pengujian secara simultan variabel ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2018.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan di bab sebelumnya, penulis ingin memberikan beberapa saran bagi peneliti yang akan datang untuk melakukan penelitian yang lebih sempurna. Saran yang peneliti berikan yaitu :

1. Bagi peneliti, perlu mempertimbangkan untuk mengkaji ulang variabel independen yang tidak berpengaruh. Variabel yang tidak berpengaruh dalam penelitian ini adalah *leverage*, profitabilitas, dan *corporate social responsibility*.
2. Bagi perusahaan, sebaiknya perhatikan setiap tindakan yang akan dilakukan serta resiko yang akan diterima terkait dengan kewajiban beban pajaknya
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya perlu mempertimbangkan objek penelitiannya karena dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2018 atau perlu menambah variabel lainnya serta waktu penelitiannya lebih lama. Karena penelitian ini tidak dapat diregenerasikan untuk semua perusahaan

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Electronic Theses & Dissertations (ETD)* Univeritas Gajah Mada.
- Brigham Eugene F. & Joel F. Houston (2011).Dasar-dasar Manajemen Keuangan.Jakarta selatan: Salemba Empat (penerjemah Ali Akbar Yulianto)
- Brown.K. B. (2012).A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance.New York.Springer
- Chariri, A. 2008. Kritik Sosial atas Pemakaian Teori dalam Penelitian Pengungkapan Sosial dan Lingkungan. *Jurnal Maksi*. Vol:8. No. 2.
- Dharma dan Ardiana, 2016. Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Skripsi Universitas Udayana* , Vol.15, h. 584-613.
- Darmawan, I Gede Hendy dan I Made Sukartha. 2014. Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 9.1 (2014): h:143-161.
- Dewi,Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut Jati. 2014. Pengaruh Karakter Ekdekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesi. ISSN : 2302-8556. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6.2 (2014) : 249 -260.
- Dyrenge, Scott D.,Michelle Hanlon, and Edward L. Maydew. 2010. The effect of executives on corporate tax avoidance. *The Accounting Reviem*. Vol.85. No. 4, pp. 1163-1189
- Fatharani, Nazhaira. 2012. Pengaruh Karakteristik Kepemilikan, Reformasi Perpajakan, dan Hubungan Politik Terhadap Tindakan Pajak Agresif. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2011. Ekonometrika Teori, Konsep Dan Aplikasi Dengan SPSS 17. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hanlon, M. & Heitzman, S. 2010. A Review of tax research. *Journal of accounting and Economics* 50, 127-128.
- Hendy Darmawan, I Gede dan Sukartha, I Made. 2014. Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.

- Hidayati, Nuur Naila dan Sri Murni. 2009. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Earnings Response Coefficient Pada Perusahaan High Profile. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 11, No. 1, April: 1-18.
- Hoi, Chun-Keung (Stan), Wu, Qiang, & Zhang, Hao. 2013. Is Corporate Social Responsibility (CSR) Associated with Tax Avoidance? Evidence from Irresponsible CSR Activities. *The Accounting Review*.
- Kasmir. 2013. Analisis Laporan Keuangan. Edisi 1. Cetakan Ke-6. Jakarta : Rajawali Pers.
- Kurniasih, T., & Sari M. 2013. Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*. Vol.18, No.1. ISSN 1410-4628. 18, 56-66.
- Lanis, R., dan Richardson, G. 2011. The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 30 (1), Hal: 50-70.
- Mardiasmo.(2016). Perpajakan-Edisi Terbaru 2016. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Ni Luh Putu Puspita Dewi, Naniek Noviarra.2017. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).E-Jurnal Akuntansi Unud, Vol.21
- Nugraha, Novia Bani dan Wahyu Meiranto. 2015. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 4 (4), pp 1-14
- Pohan, Chairil Anwar.2016. Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Pradipta, Dyah Hayu. 2014. Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran pajak. *Skripsi Universitas Gajah Mada*.
- Putri, Shintya Dewi Adi. 2015. Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, vol.4(2), pp. 123-142
- Prakosa, Kesit Bambang. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XVII.

- Prayogo, Kosyi Hadi. 2015. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Skripsi. Universitas Diponegoro*.
- Putri, Shintya Dewi Adi. 2015. Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, vol.4(2), pp. 123-142
- Rusydi, M. Khoiru. 2013. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Aggressive Tax Avoidance di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol. 4 No.2. *Universitas Brawijaya. Malang*
- Sri Urip, 2014. Strategi CSR: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Untuk Peningkatan Daya Saing Perusahaan di Pasar Negara Berkembang. Penerbit : Lentera Hati, Tangerang Selatan.
- Suyanto, Krisnata Dwi dan Suparmono. 2012. Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Afesivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan. Vol 16, No. 2*, hlm 167-177.
- Suryadi. (2006). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik, 4 (1)*, 105-121.
- Swingly. Calvin dan I Made Sukartha. 2015. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 10.1 (2015): h:47-62.
- Wahyudi, Dudi. Analisis Empiris Pengaruh Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Akunansi Edisi 2 No. 4 2015*. Jurnal Lingkar Widayaiswara.
- Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia Buku I. Edisi 10. Salemba Empat. Jakarta



LAMPIRAN

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau